LAPORAN
KINERJA
2020

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT

LAPORAN KINERJA 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat diselesaikan pada waktunya. LAPKIN tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

LAPKIN dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LAPKIN ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LAPKIN ini oleh setiap jajaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari,

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut

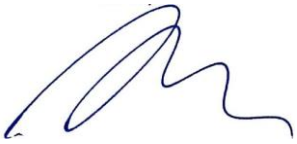

Hj. Nina Sandra, SKM.,MM
NIP. 19640710 198511 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Persiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implimentasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik *(good governance)* di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terdiri 5 Esselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Pelayanan Kesehatan dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Sedangkan Esselon IV sejumlah 15 Jabatan (3 Kepala Sub Baigan dan 12 Kepala Seksi).

Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, tentunya sejalan dengan visi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terpilih dan juga sejalan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana bidang kesehatan juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang

ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang/stunting pada balita.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, dan disandingkan dengan visi dan misi Bupati Tanah laut dimana Dinas kesehatan berkewajiban dalam misi I yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2020 berdasarkan target sasaran Renstra Tahun 2020, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	85 %	80 %	94 %
		2. Persentase ibu bersalin yang dilaya ni sesuai Standar	85 %	90 %	100 %
		3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	92 %	96 %	100 %
		4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	90 %	77 %	86 %
2	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	40 %	45 %	113 %
		2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100 %	27 %	27 %

3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa STBM	53,80 %	71 %	132 %
		2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80 %	61 %	77 %
		3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70 %	81 %	116 %
4	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100 %	57 %	57 %
		2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100 %	80 %	80 %
6	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	37 %	0 %	0 %
		2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	19 %	100 %	100 %
		4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	25 %	0 %	0 %
		5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	44 %	52 %	118 %

		6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100 %	100 %	100 %
7	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	65 %	100 %	100 %
		2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	89 %	100 %	100 %
		3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	87 %	100 %	100 %
		4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100 %	60 %	60 %
8	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100 %	100 %	100 %
		4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100 %	100 %	100 %
		5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100 %	100 %	100 %

		6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	71 %	71,66 %	101 %

Realisasi Anggaran Belanja Langsung (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dari Anggaran Rp. 256.477.237.923,- terealisasi sebesar Rp. 195.455.442.323,- (76%), dan fisik 77 %. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (APBD) tahun 2020 dari Anggaran Rp. 90.398.445.579,- terealisasi sebesar Rp. 76.242.644.588,- (84,34%). Realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp71.387.915.073,- terealisasi 76.016.667.657,35 (106,48%) (LRA versi BPKAD)

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis bidang kesehatan;
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal;
3. Melakukan inovasi anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku di masa pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir untuk terus memberikan dan meningkatakan standar pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat serta mencapai target indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung keberhasilan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
4. Mendukung dan mensukseskan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur Pasca Bencana dan Pemenuhan Target-Target Indikator RPJMD khususnya Bidang Kesehatan.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi 5

C. Isu Strategis 23

D. Produk dan Layanan 24

E. Sistematika Penyajian 25

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 28

A. Visi RPJMD 28

B. Misi RPJM 28

C. Tujuan dan Sasaran Strategis 29

D. Indikator Kinerja Utama 32

E. Perjanjian Kinerja 34

F. Program dan Kegiatan 35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 39

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi 40

1. Sasaran RPJMD 43

2. Eselon II (Kepala Dinas Kesehatan) 48

3. Eselon III (Sekretaris) A 65

1). Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) A.1 66

2). Eselon IV (Kasubbag Keuangan dan Aset) A.2 69

3). Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan) A.2 .. 72

4. Eselon III (Kepala Bidang) B 74

a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 74

1). Eselon IV (Kepala Seksi Promosi Kesehatan) B.1 76

2). Eselon IV (Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga) B.2 79

3). Eselon IV (Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat) B.3 84

b. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan..... 93
1). Eselon IV (Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan) B.4..... 94
2). Eselon IV (Kepala Seksi Farmasin dan Alkes) B.5..... 105
3). Eselon IV (Kepala Seksi SDMK) B.6 ……..... 84
c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit..... 113
1). Eselon IV (Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi) B.7 114
2). Eselon IV (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular) B.8 128
3). Eselon IV (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa) B.9 132
d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 135
1). Eselon IV (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional) B.10..... 136
2). Eselon IV (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan) B.11 142
3). Eselon IV (Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) B.12 146
B. Akuntabilitas Keuangan …….. 149
1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2020 ……. 149
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program …… 150
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020 ….. 154
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ……..... 171
B. Strategi Peningkatan Kinerja ……..... 173
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Cascading (Pohon Kinerja)
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (I - IV)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan 2020
8. SK. Tim Penyusun LKj SKPD Tahun 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kesehatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2020 Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

LAPKIN Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu dalam mendukung Visi Bupati Tanah Laut "**Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (BERkarya, INovasi, TEtata, Religius, AKtual, SInergi)" melalui pelaksanaan program/kegiatan**

pada Telaahan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yakni: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pelaksanaan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Di dalam RPJP memberikan arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan yaitu Pelayanan kesehatan selain tetap fokus pada pelayanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas maupun posyandu juga kedepan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yang ada di Pelaihari. Peningkatan kualitas ini guna merespon perkembangan jenis penyakit degeneratif utama maupun konsekwensi dari adanya kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk menghasilkan tenaga penyedia tenaga madya kesehatan yang dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit. Sejalan dengan itu untuk menyeimbangkan kemajuan IPTEKS di bidang kesehatan, maka pembangunan pendidikan di bidang kesehatan juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pendidikan kesehatan.

Arah dari pembangunan gizi adalah berupaya untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang. Pembangunan gizi juga diarahkan untuk mewujudkan keasadaran akan perlunya gizi yang seimbang bagi kesehatan tubuh serta peningkatan pengetahuan akan gizi. .

Dari arahan RPJP menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan antara lain yaitu untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang, Selanjutnya diarahkan untuk mewujudkan kesadaran akan perlunya gizi yang

seimbang bagi kesehatan tubuh, serta peningkatan pengetahuan tentang gizi, meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan optimalisasi peran puskesmas; puskesmas pembantu dan posyandu terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, dan meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan dasar yang prima. Dimana rumah sakit di Pelaihari sebagai rumah sakit rujukan di kabupaten Tanah Laut dapat memastikan arah penajaman kualitas dan fokus pelayanan yang akan diberikannya dan ditunjang dengan penyediaan tenaga dokter spesialis dan peralatan yang memadai.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Kesehatan yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan.

B. Struktur Organisasi Tugas dan fungsi

Dinas Kesehatan merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Dinas Kesehatan merupakan unsur pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun struktur Organisasi Dinas Kesehatan dapat di lihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 67 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN

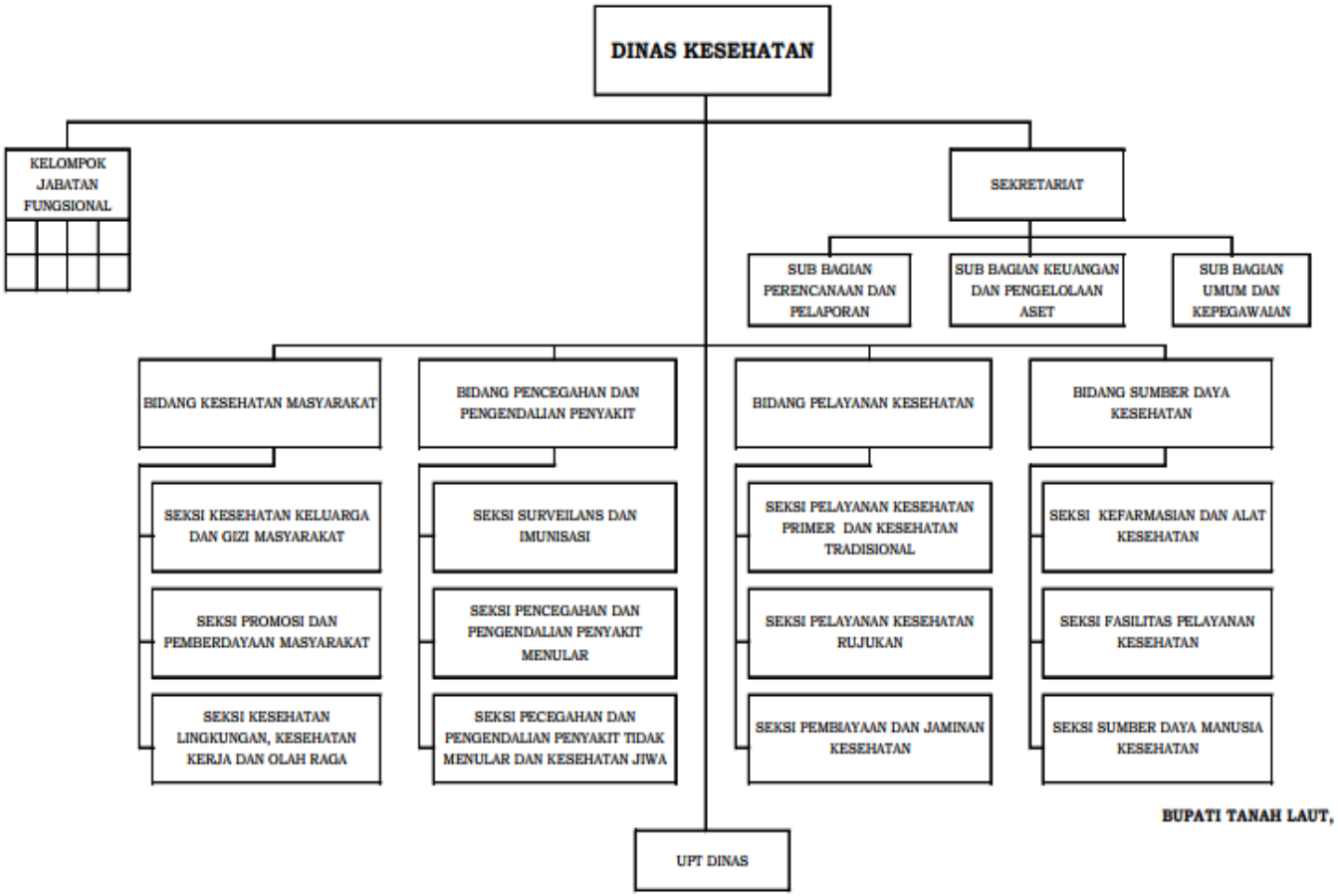

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Dinas Kesehatan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
   2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
   1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
   2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;dan
   3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari
   1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
   2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
   3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
   1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
   2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan
   3) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
   1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
   2) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
   3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
g. UPT Dinas; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi :

Kepala Dinas

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
d. pelaksanaan administrasi dinas
e. pembinaan UPT Dinas dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

(1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

(2) Mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas
b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kesehatan
c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kesehatan
d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan

f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataanbarang.
g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan
i. pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

- Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan Pengelolaan Aset.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bidang Kesehatan Masyarakat

(1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesehatan masyarakat.

(2) Menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja bidang kesehatan Masyarakat
b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi dari:

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

(1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

(2) Menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi dari:

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi
2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan
3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Seksi Surveilans Dan Imunisasi

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait surveilans dan imunisasi.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pelayanan Kesehatan

(1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan.

(2) Menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan kesehatan
b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan

rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukantermasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
e. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi dari:

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional.

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan rujukan.

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan

(1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.

(2) Menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja bidang sumber daya kesehatan
b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta sumber daya manusia kesehatan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi dari:

1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kefarmasian dan alat kesehatan

Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fasilitas pelayanan kesehatan..

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait sumber daya kesehatan.

UPT Dinas

1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan

pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional

1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja

1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.

3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka, pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.

7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

Kepegawaian

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

Jabatan

1) Kepala Dinas Kesehatan merupkan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

2) Sekretaris Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.

3) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 58 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 58 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 4 orang, Kepala Seksi (Pejabat Pangawas) sebanyak 15 orang dan, staf pelaksana sebanyak 37 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			4			4
4	Kepala Seksi				15		15
5	Staf PNS/Pelaksana					37	37
	JUMLAH						58

Golongan III menempati jumlah terbanyak di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 52 orang, diikuti golongan II sebanyak 11 orang, golongan IV sebanyak 7 orang serta ditambah

tenaga kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) orang. Selain pegawai berstatus PNS dan Pegawai PTT.

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaaan pendidikan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat di tabel 1.2.

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris			1					1
3	Kepala Bidang		3	1					4
4	Kepala Seksi		1	12	2				15
5	Staf		1	8	20	8			37
	JUMLAH								58

Sumber: Dinas Kesehatan

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 6 orang memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang 3 orang , Kepala Seksi 1 orang dan Staf 1 orang. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 22 orang, D3 sebanyak 22 orang dan SLTA sebanyak 8 orang.

Terkait dengan LAPKIN, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Keberadaan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu pendukung utama pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan pelayanan kesehatan baik melalui institusi

puskesmas maupun yang langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan.

a. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan Tahun 2020

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	7	9		17
3	Bidang Pelayanan Kesehatan	1	8			9
4	Bidang P2P	2	8			10
5	Bidang Kesehatan Masyarakat		9	1		10
6	Bidang Sumber Daya Kesehatan	2	6	1		9
7	UPT. RSUD H. Boedjasin	23	193	25	2	243
8	UPT. RS K.H.Mansyur Kintap	1	23	11		35
9	UPT Labkes		4	3		7
10	UPT IFK	1	7	1		9
11	UPT Puskesmas Pelaihari	3	52	7		62
12	UPT Puskesmas Angsau	2	30	5		37
13	UPT Puskesmas S. Riam		15	5		20
14	UPT Puskesmas Panyipatan		14	8		22
15	UPT Puskesmas Batakan		8	4		12
16	UPT Puskesmas Takisung		24	4		28
17	UPT Puskesmas Jorong	2	22	4		28
18	UPT Puskesmas Asam-Asam	2	15	5		22
19	UPT Puskesmas Kintap	1	17	3		21
20	UPT Puskesmas Sei Cuka		14	2		16
21	UPT Puskesmas Tajau Pecah		31	11		42
22	UPT Puskesmas T. Ulang	2	22	8		32
23	UPT Puskesmas Bati-Bati	4	35	6		45

24	UPT Puskesmas Kait-Kait	1	16	4		21
25	UPT Puskesmas Kurau		16	8		24
26	UPT Puskesmas Padang Luas	1	5	4		20
27	UPT Puskesmas Tirta Jaya	2	27	2		31
28	UPT Puskesmas T. Habulu		13	7		20
29	UPT Puskesmas B. Makmur		14	8		22

b. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel .1.4

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT

menurut tingkat pendidikan tahun 2020

No	Unit Kerja	Golongan						Jmlh
		S-2	S-1	DIII	SMA	SMP	SD	
1.	Kepala Dinas	1						1
2.	Sekretariat	1	4	5	7			17
3.	Bidang Pelayanan Kesehatan		5	4				9
4.	Bidang P2PL	2	3	5				10
5.	Bidang Kesehatan Masyarakat	1	3	6				10
6.	Bidang Sumber Daya Kesehatan	2	4	2	1			9
7	UPT. RSUD H. Boedjasin							
8	UPT. RS K.H.Mansyur Kintap	1	15	19				35
9	UPT Labkes		1	5	1			7
10	UPT IFK		4	3	1			8
11	UPT Puskesmas Pelaihari	2	15	29	4			62
12	UPT Puskesmas Angsau		12	20	5			37
13	UPT Puskesmas S. Riam	1	3	14	2			20
14	UPT Puskesmas Panyipatan		3	16	3			22
15	UPT Puskesmas Batakan		6	5	1			12
16	UPT Puskesmas Takisung		7	18	3			28

17	UPT Puskesmas Jorong	1	4	21	2			28
18	UPT Puskesmas Asam-Asam		4	16	2			22
19	UPT Puskesmas Kintap	3	1	14	3			21
20	UPT Puskesmas Sei Cuka	1	2	11	2			16
21	UPT Puskesmas Tajau Pecah	1	7	30	4			42
22	UPT Puskesmas T. Ulang		6	21	5			32
23	UPT Puskesmas Bati-Bati	2	14	23	6			45
24	UPT Puskesmas Kait-Kait	1	5	13	2			21
25	UPT Puskesmas Kurau		5	14	5			24
26	UPT Puskesmas Padang Luas	1	5	12	2			20
27	UPT Puskesmas Tirta Jaya		10	14	7			31
28	UPT Puskesmas T. Habulu		5	13	2			20
29	UPT Puskesmas B. Makmur	2	4	16				22

C. Isu Strategis

1. Terdapat 4 (empat) isu strategis dalam pembangunan kesehatan di tahun 2020 yaitu
   - Penurunan angka stunting;
   - Penurunan kematian ibu dan bayi;
   - Perbaikan pengelolaan sistem JKN;
   - Penguatan pelayanan kesehatan serta obat dan alat kesehatan.
2. Kasus *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) s.d Desember 2020

   Terhitung semenjak bulan Maret sampai dengan Desember 2020 jumlah kasus COVID-19 sebanyak 1.498 orang, sembuh 1.202 orang / 80,24 % meninggal 38 orang / 2,54 %, Attack Rote (AR) 429,7 per 100.000 penduduk.

D. Produk dan Layanan

Dengan adanya perkembangan dan dinamisasi serta globalisasi yang terjadi dengan sangat cepat di masyarakat mengakibatkan munculnya suatu pola baru dan kecenderungan yang meningkat pula pada kebutuhan dan tuntutan atas pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas. Pemberian pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan di puskesmas saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat bukan saja dari sesama instansi kesehatan tetapi juga dari para praktisi dan para profesional yang bergerak di bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan oleh semakin banyaknya bermunculan ide, gagasan, dan terobosan baru dalam dunia usaha pelayanan kesehatan untuk merespons tuntutan dan kebutuhan pasar dalam mencari bentuk produk pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat bersaing bukan hanya dari sisi harga tetapi juga benefit yang diberikan.

Adapun Produk dan Layanan di bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Dasar:

   Pelayanan kesehatan dasar yang juga disebut basic health services terdiri dari beberapa jenis pelayanan kesehatan yang dianggap esensial (sangat penting) untuk menjaga kesehatan seseorang, keluarga dan masyarakat agar hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Terdapat dua ketentuan yang menetapkan jenis-jenis pelayanan dasar, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan 43/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Peraturan Menteri Kesehatan 75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jenis-jenis pelayanan kesehatan dasar tersebut memerlukan pelayanan promotif, preventif, skrining, kuratif, dan rehabilitatif yang harus diberikan secara komprehensif dan holistik baik kepada kelompok masyarakat maupun individu, Pelayanan kesehatan Dasa dilakukan di 19 Puskesmas tersebar

di 11 Kecamatan, adapun jenis pelayanan kesehatan Dasar adalah sebagai berikut:

a. Promosi Kesehatan
b. Kesehatan Lingkungan
c. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit
d. Kesehatan Keluarga dan reproduksi
e. Perbaikan Gizi Masyarakat
f. Penyembuhan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daraeh H. Boedjasin.

Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdiri atas:

a. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik)
b. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialitik)

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2020. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2020 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  1. Sasaran RPJMD
  2. Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
  3. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian) A
     1). Eselon IV (Kasubbag /Kasubbid) A.1
     2). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.2
  4. Eselon III (Kepala Bidang) B
     1). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.1
     2). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.2
- B.Akuntabilitas Keuangan
  1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2020
  2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
  3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Cascading (Pohon Kinerja)
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (I - IV)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan 2020
8. SK. Tim Penyusun LKj SKPD Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

A. Visi RPJMD

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

"MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI
(BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, Aktual, dan Sinergi)"

B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Kesehatan melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;

5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yaitu: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Tujuan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sesuai misi Dinas Kesehatan adalah :

1. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati tahun 2019 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati tahun 2020

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)						
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Target**
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi	**Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat**	AKI per 100.000 Kelahiran Hidup	14	**Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat**	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	85%
		AKB per 1000 kelahiran hidup	9,8		2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	85%
		Prevalensi stunting	23%		3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	92%

untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya					4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	90%
				Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	40%
					2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%
				Meningkatnya Kesehatan Lingkungan,	1. Persentase desa STBM	53,8%
					2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%
					3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%
				Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100%
				Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%
					2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%
					3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	**1. Indeks kepuasan masyarakat**	82,9	**Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan**	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	37%
		2. Indeks Keluarga Sehat	0,8		2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%
					3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	19%
					4. Persentase Desa dengan IKS	25%

					katagori Sehat	
					5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	44%
					6 . Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%
				Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	65%
					2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	89%
					3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	87%
					1. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%
				Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%
					2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%
					3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%
					4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%
					5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%
					6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	71%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Visi, Misi Kepala Daerah , tujuan, indikator tujuan,sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan, yang menjadi acuan pedoman yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun atau masa Renstra 2018-2023.

Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel matrik keselarasan pada lampiran.

Tabel matrik keselarasan dibuat untuk memudahkan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan kinerja serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020, sehingga terdapat keselarasan antara Renstra SKPD dengan Rencana Kerja Tahunan SKPD atau Perjanjian Kinerja SKPD, sehingga perencanaan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selaras dan berkesinambungan.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan strategis. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU Dinas Kesehatan berjumlah 5 indikator. IKU ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Tujuan strategis yang merupakan Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan

IKU Dinas Kesehatan merupakan Tujuan yang paling utama dari semua program dan kegiatan bidang kesehatan yaitu:

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan Indikator sebagai berikut:
   a. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.
   b. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
   c. Prevalesi Stunting
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Indikator sebagai berikut :
   a. Indeks Keluarga Sehat

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah lahir hidup dikali 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Kematian bayi dibagi jumlah lahir hidup dikali 1.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		3	Prevalensi stunting	Balita Stunting dibagi balita terentry di EPPGBM dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah keluarga dengan IKS > 0,800 dibagi dengan jumlah keluarga seluruhnya	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
		2	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata tertimbang perunsur pelajaran dikali dengan 25	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan Nomor 1 (satu) yaitu Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat adalah meliputi pengukuran peningkatan status kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup, Prevalensi Gizi stunting, dengan kegiatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan pelayanan gizi pada balita, kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta pencegahan dan pengendalian penyakit, penanggungjawab Bidang Kesehatan Masyarakat serta Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan Nomor 2 (dua) yaitu Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan meliputi pengukuran Indeks Keluarga Sehat dan Indeks Kepuasan Masyarakat, kegiatannya berupa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, akreditasi fasilitas kesehatan, pelayananan kegawatdaruratan oleh public service center (PSC), peningkatan status fasilitas kesehatan menjadi BLUD, upaya menjadikan desa dengan Indikator Keluarga Sehat (IKS) kategori sehat, pembinaan kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di desa, jaminan kesehatan kepada penduduk miskin, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan, serta pelayanan administrasi dan dukungan operasional perkantoran sesuai standar dan aturan, penanggungjawab Bagian Sekretariat, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

E. Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2020 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan Renstra maupun Indikator Kinerja Utama. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 yang telah disepakati baik oleh Kepala Dinas, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV terdapat pada lampiran.

Perjanjian kinerja tahun 2020 telah sesuai dan telah tersaji pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada awal tahun sebelum pelaksanaan DPA dan setelah PERDA APBD Tahun 2020 ditetapkan. Sehingga terdapat kesesuaian antara matrik perjanjian kinerja secara keseluruhan dengan dokumen perjanjian kinerja seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dengan disesuaikan dengan target sasaran strategis yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD.

F. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan kinerja Tahun 2020, melaksanakan 18 program dan 46 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2020

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**36.293.337.682**
1. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	981.492.920
2. Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	13.486.210.065
3. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	21.825.634.697
2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	**13.299.730.237**
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	11.286.906.200
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.980.494.037
6. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	32.330.000
7.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0
3. Program Jamkesmas	**2.103.789.000**
8. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	2.103.789.000

4. Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	**63.712.271.641**
9. Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.547.510.000
10 Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan	2.067.760.193
11. Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	59.588.917.348
12. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Krisis Kesehatan dan SPGDT PCS 199	315.235.000
13. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	192.849.100
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	**2.477.038.000**
14. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK REGULER)	1.781.098.000
15. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (Penurunan Stunting - DAK Penugasan)	478.840.000
16. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Kesehatan	217.100.000
6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	**268.253.000**
17. Pembinaan, Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	121.070.000
18. Distribusi Obat dan e Logistik (DAK Non Fisik)	147.183.000
7. Program Informasi Kesehatan Medik	**209.956.500**
19. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Rekam Medik	209.956.500
20. Pengadaan Cetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	0
8. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan	**7.561.973.600**
21. Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	175.071.900
22. Pembinaan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	268.587.000
23. Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	600.000.000
24. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	110.023.500

25. Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (DID)	6.408.291.200
9. Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	**10.144.893.000**
26. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	136.758.000
27. Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular	308.060.000
28. Peningkatan Imunisasi, Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	315.705.000
29. Peningkatan Imunisasi, Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DID)	9.384.370.000
10. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)	**21.605.532.250**
30. Pembinaan, Pengembangan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	6.445.500.000
31. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	560.554.200
32. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.532.810.000
33. Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan	178.593.050
34. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK Fisik)	4.888.075.000
11. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	**1.254.950.000**
35. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	1.254.950.000
12. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	**10.611.887.000**
36. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	10.611.887.000
13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	**18.898.900**

37. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	18.898.900
14. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	**66.458.817.913**
38. Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	66.458.817.913
15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	**2.243.280.000**
39. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)	1.398.130.000
40. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	845.150.000
16. Program Bantuan Operasional Kesehatan	**17.508.090.000**
41. Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	17.430.309.000
42. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	77.781.000
17. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	**185.559.200**
43. Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	35.025.000
44. Penyusunan laporan keuangan	115.534.200
45. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	35.000.000
18. Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok	**518.980.000**
46. Pengembangan kawasan tanpa rokok (Dana KTR)	518.980.000
	256.477.237.923

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2020 ini merupakan laporan kinerja tahun kedua RPJMD 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pencapaian sasaran strategis memuat tentang nilai pencapaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- Rentang nilai 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- Rentang nilai 70 s/d <85 : Berhasil
- Rentang nilai 55 s/d <70 : Cukup Berhasil
- Nilai < 55 : Tidak Berhasil

Rumus perhitungan untuk mendapatkan angka diatas adalah jumlah keseluruhan capaian dibagi jumlah item/indikator capaian dikali seratus persen.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2020.

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggngjawaban secara periodik (Instruksi Presiden RI No.7 Th 1999 tentang AKIP). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa peningkatkan status kesehatan masyarakat dan peningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan harus terus selalu dilakukan secara berkesinambungan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), prevalensi gizi stunting, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan meningkatkan indeks kelurga sehat.

Untuk menggambarkan kinerja sasaran strategis target dan realisasinya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dari Eselon II sampai dengan Eselon IV selama kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Sasaran Strategis Dinas Kesehatan
Tahun 2019 dan 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisai Kinerja Sasaran pada tahun ke						
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
				2019			2020			2023
1	Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	80%	85%	100%	85%	80%	94%	100%
			2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	80%	98%	100%	85%	90%	100%	100%
			3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	90%	97%	100%	92%	96%	100%	100%
			4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	88%	78%	89%	90%	77%	86%	100%
		Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	40%	60%	100%	40%	45%	113%	60%
			2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	75%	75%	100%	27%	27%	100%

		Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa STBM	32,3%	61%	54%	53,80%	71%	132%	100%
			2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	61%	76%	80%	61%	77%	80%
			3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	74%	100%	70%	81%	116%	70%
		Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	52%	52%	100%	57%	57%	100%
			2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	90%	90%	100%	80%	80%	100%
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	21%	37%	100%	37%	0%	0%	68%
			2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	0%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	4,7%	24%	100%	19%	100%	100%	100%
			4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	20%	0%	0%	25%	0%	0%	50%
			5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	41%	41%	100%	44%	52%	118%	56%
			6 . Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	38%	78%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	60%	56%	100%	65%	100%	100%	80%
			2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	84%	90%	100%	89%	100%	100%	100%
			3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	85%	90%	100%	87%	100%	100%	100%
			1. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	56%	56%	100%	60%	60%	100%

		Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
			2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	70%	74%	100%	71%	71,66%	101%	74%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 8 Sasaran Strategis dan 29 indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, rata-rata telah tercapai seluruhnya 100% dan terdapat 11 indikator sasaran yang realisasinya melebihi target, namun pada tahun 2020 ada 7 indikator yang realisasinya mengalami penurunan dari target sebagai salah satu dampak adanya pandemi Covid-19.

Untuk menggambarkan analisa pencapaian per sasaran strategis pada pada tabel yang disajikan diatas dapat diuraikan pada sub bab berikutnya, agar dapat memberikan informasi pencapaian selama 1 (satu) tahun dan bagaimana trend yang terjadi pada setiap tahun selama Tahun Renstra 2019-2023.

1. Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD Dinas kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
   a. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar
   b. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar
   c. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar
   d. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar
2. Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Persentase Rumah Tangga berPHBS.
b. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat

3. Meningkatnya Kesehatan Lingkungan, dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah:
   a. Persentase desa STBM.
   b. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan.
   c. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan.
4. Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga, dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah:
   a. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olah raga.
5. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah
   a. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar.
   b. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular.
   c. Persentase Des a Universal Child Immunization (UCI).
6. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
   a. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama.
   b. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Public Service Center (PSC)
   c. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD.
   d. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat.
   e. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.
   f. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN.
7. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
   a. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.
   b. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar.
   c. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional.

d. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar.

8. Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
   a. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan.
   b. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar.
   c. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan.
   d. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar.
   e. Persentase Pencatatan aset sesuai standar.
   f. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP).

Adapun Tujuan dan sasaran yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel terlampir:

Tabel 3.2

Tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Kesehatan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas kesehatan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target							Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada tahun ke						
				2019	Realisasi	2020	Realisasi	2021	2022	2023			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
													2019			2020			2023
1	Misi 1 : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu per 100.000	15	46,2	14	123	13	11	10	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai	80%	85%	100%	85%	80%	94%	100%
			Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran hidup	10	7,4	9,8	11	9,6	9,4	9,2		2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	80%	98%	100%	85%	90%	100%	100%
			Prevalensi Gizi stunting	24%	5%	23%	11%	22%	21%	20%		3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	90%	97%	100%	92%	96%	100%	100%
												4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	88%	78%	89%	90%	77%	86%	100%

										Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	40%	60%	100%	40%	45%	113%	60%
											2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	75%	75%	100%	27%	27%	100%
										Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa STBM	32,3%	61%	54%	53,80%	71%	132%	100%
											2. Persentase TTU yang memenuhi syarat	80%	61%	76%	80%	61%	77%	80%
											3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat	70%	74%	100%	70%	81%	116%	70%
										Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
										Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	52%	52%	100%	57%	57%	100%
											2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%
											3. Persentase Desa Universal Child	100%	90%	90%	100%	80%	80%	100%

	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Indeks kepuasan masyarakat	81,5	81,5	82,9	83,53	84,4	85,9	88,31	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	21%	37%	100%	37%	0%	0%	68%
		2. Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,14	0,8	0,13	0,8	0,8	0,8		2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	0%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
											3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	4,7%	24%	100%	19%	100%	100%	100%
											4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	20%	0%	0%	25%	0%	0%	50%
											5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	41%	41%	100%	44%	52%	118%	56%
											6 . Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	38%	78%	100%	100%	100%	100%	100%

										Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	60%	56%	100%	65%	100%	100%	80%
											2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	84%	90%	100%	89%	100%	100%	100%
											3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	85%	90%	100%	87%	100%	100%	100%
											1. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	56%	56%	100%	60%	60%	100%

									Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
										2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
										3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
										4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
										5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
										6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	70%	74%	100%	71%	71,66%	101%	74%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran RPJMD sesuai target yang telah ditentukan selama kurun waktu 5 (lima tahun) yaitu Misi 1 : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dengan Tujuan : Meningkatkan status kesehatan masyarakat dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator tujuan RPJMD yaitu menurunkan AKI, AKB, dan Prevalensi Stunting, serta meningkatkan Indeks Keluarga Sehat dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil sebagai berikut untuk tahun ke 1 yaitu tahun 2019 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2019, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator tujuan berkriteria sangat berhasil yaitu Penurunan Angka Kematian Bayi (capaian 100%), Penurunan Prevalensi Gizi Stunting (capaian 100%) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (capaian 100%) sedangkan 1 (satu) indikator tujuan Cukup Berhasil yaitu Penurunan Angka Kamatian Ibu (capaian 63,3%) dan 1 (satu) indikator tujuan tidak berhasil yaitu Indeks Keluarga Sehat Capaian (12,5%), tetapi secara keseluruhan rata-rata capaian sebesar 75,2% atau bisa dikatakan scara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja Utama Berhasil, kemudian pada tahun ke 2 yaitu tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2020 disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator tujuan berkriteria sangat berhasil yaitu Penurunan Prevalensi Gizi Stunting (capaian 216% melebihi sasaran) dan Indeks Kepuasan Masyarakat

(capaian 101%), 1 (satu) indikator tujuan berhasil yaitu Angka Kematian Bayi (capaian 89%), kemudian ada 2 (dua) indikator tujuan tidak berhasil yaitu Angka Kematian ibu (capaian 11%) dan Indeks Keluarga Sehat (capaian 16%), tetapi secara keseluruhan rata-rata capaian sebesar 63,2% atau bisa dikatakan secara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja Utama cukup berhasil, akan tetapi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai salah satu efek adanya pandemi Covid-19.

2. Eselon II (Kepala Dinas Kesehatan)

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan pada tahun 2020 yang telah ditetapkan adalah juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas kesehatan 2020

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% pencapaian
A. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat :			
1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	14	123	11
2. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	9,8	11	89
3. Prevalensi stunting	23	10,67	216 (100)
B. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan			
1. Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,13	16
2. Indeks kepuasan Masyarakat	82,9	83,53	101 (100)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2020, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran berkriteria sangat berhasil yaitu Penurunan Angka Kematian

Bayi, Penurunan Prevalensi Gizi Stunting dan Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan 2 (dua) sasaran tidak berhasil yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Indeks Keluarga Sehat, secara keseluruhan rata-rata capaian sebesar 63,2% atau bisa dikatakan scara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja Utama Cukup Berhasil, mengalami penurunan dibanding tahun 2019 (rata-rata capaian 75,2 %) hal ini sebagai salah satu dampak adanya pandemi Covid-19.

Tujuan/sasaran strategis indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan merupakan komponen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2020 yaitu :

1. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan di Kabupaten Tanah Laut telah berhasil meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain dilihat dari beberapa indikator, seperti angka kematian bayi, Prevalensi Gizi Stunting terus mengalami perbaikan. Untuk Penurunan kematian ibu perlu mendapat perhatian dan upaya yang lebih intensif.

Secara keseluruhan untuk peningkatan Status Kesehatan Masyarakat ini berhasil, Keberhasilan ini banyak dipengaruhi oleh pengembangan layanan kesehatan di sektor publik. Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh faktor yang mencakup akses dan kualitas layanan kesehatan yang terus membaik. Akses layanan kesehatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas fasilitas layanan kesehatan, seperti Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan jaringannya. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu terus ditingkatkan melaui pembiayaan kesehatan pembiayaan kesehatan peserta PBI Jamkesda dan PBI APBD/JKN-KIS.

Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2023)
				Target	Capaian	% Capaian	
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	15	15	14	123	11%	10
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	10,8	10	10	11	89%	9,2
3	Prevalensi Gizi stunting (%)		24	23	10,67	216% (100%)	20%

Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Prevalensi gizi stunting.

1) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 123 per 100.000 kelahiran hidup (8 kasus kematian ibu), angka tersebut tidak mampu mencapai target renstra di tahun 2020 sebesar 14 per 100.000 kelahiran hidup. Pencapaian AKI ini di hitung nilai realisasi kinerja sebesar 11 % dalam kategori tidak berhasil. Selanjutnya kecenderungan AKI dalam lima tahun terakhir di gambarkan dalam gambar berikut.

Grafik. 3.1

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanah Laut tahun 2016-2020

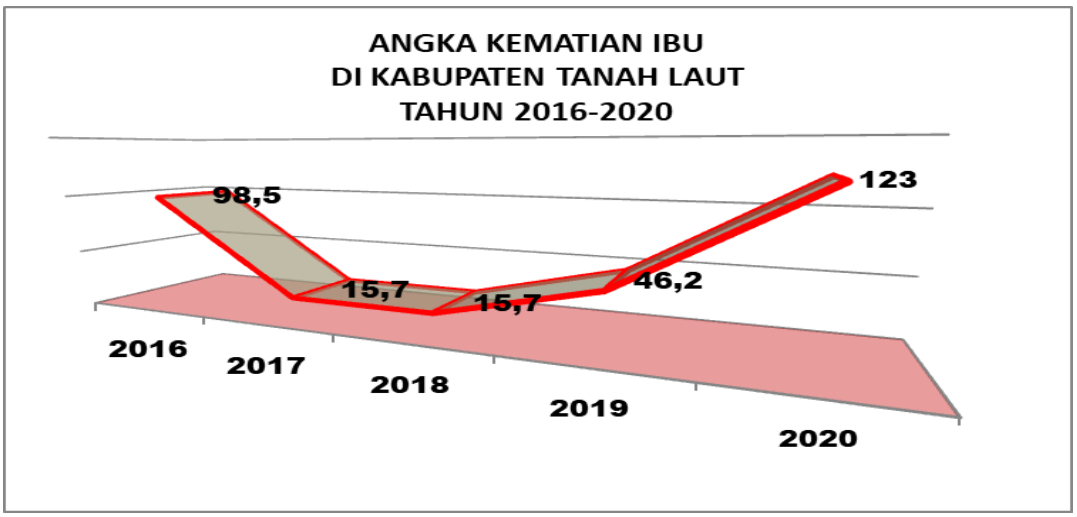

Gambar diatas menunjukkan capaian AKI per tahun cenderung menurun tetapi meningkat pada tahun 2017 dan 2018, mengalami peningkatan di tahun 2019 dan 2020 kematian ibu mencapai titik terendah dan masing masing hanya terjadi 1 (satu) kematian ibu, namun tahun 2019 meningkat, jumlah kematian ibu mencapai 3 (tiga orang) dan di tahun 2020 bertamabah 8 (delapan) kematian, lebih rendah dari target RPJMN yaitu 183 per 100.000 kelahiram hidup dan lebih tinggi dari target SDGs yaitu 70 per 100.000 kelahiram hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut mencapai 11 per 1000 Kelahiran Hidup lebih rendah dari target RPJMN yaitu 16 per 1000 Kelahiran Hidup dan SDGs sebesar 12 per 1000 Kelahiran Hidup lebih. Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan masa nifas serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan oleh Perdarahan 3 (tiga) orang, Hypertensi dalam kehamilan 3 (tiga) orang, Infeksi 1 (satu) orang, Gangguan darah 1 (satu) orang dan sebagian besar kematian ada di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit). hal ini juga

disebabkan adanya keterlambatan penanganan baik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, walaupun pengenalan tanda bahaya ibu di tingkat fasilitas kesehatan sudah diketahui lebih dini.

Kondisi saat ini tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan sudah semakin baik terlihat dari data PWS persalinan dengan tenaga kesehatan rerata diatas 90 % di masing-masing wilayah kerja puskesmas sehingga keterlambatan karena pengambilan keputusan semakin kecil. Yang perlu mendapat perlakuan khusus adalah masalah ketepatan waktu dalam merujuk maupun menangani kasus kegawatan untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan dalam negenali tanda kegawatan dan penanganan yang tepat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian ibu pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan SDM Kesehatan : Sosialisasi pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi.
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan : Audit Maternal Perinatal, Review Deteksi Dini Ibu Hamil Beresiko, Sosialisasi Asuhan Persalinan Normal, Rakor Koordinator KIA dan KB.
- Kunjungan dokter spesialis kebidanan ke Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dengan riseko tinggi.
- Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program
- Pemantapan sistem rujukan terutama sistem rujukan ibu hamil dan bersalin
- Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal)
- Promosi kesehatan dan pemberdayaan .
- Pengoptimalan Peran dan tupoksi Bidan desa.
- Peningkatan pelayanan Ibu Hamil dimasa Pandemi Covid-19

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi yang akan dilakukan dalam penurunan kematian ibu adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Rencana Intervensi di Kabupaten Tanah Laut

No	FAKTOR	ANALISA PENYEBAB	INTERVENSI
1	Fasilitas pelayanan kesehatan	Kualitas pelayanan KIA yang masih perlu ditingkatkan	Kebijakan Pemeriksaan bumil gratis bagi yang mempnyai KTP Tanah Laut
			Implementasi ANC Terpadu
			Tata laksana dan Rujukan
			Audit Maternal Perinatal
			Kunjungan dokter spesialis kebidanan ke Puskesmas secara berkala
2	Petugas	Kompetensi petugas yang masih beragam	Peningkatan kapasitas petugas
		Pemantauan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan oleh petugas belum optimal	Jejaring antar fasilitas kesehatan untuk pemantauan ibu
			Penguatan peran bidan desa
			Monev pelaksanaan PISPK
3	Faktor Ibu	Pengetahuan Ibu tentang tanda bahaya kehamilan kurang	Kunjungan rumah ibu hamil dan neonatus risiko tinggi
			Konsultasi dokter ahli melalui kunjungan dokter spesialis kandungan ke Puskesmas secara berkala
			Peningkatan cakupan dan

			kwalitas pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
		Perbaikan gizi pada ibu hamil KEK dan atau anemia	Intervensi Gizi pada bumil KEK, bumil anemia
4	Pemberdayaan masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam mendampingi ibu hamil belum optimal	Peningkatan pelayanan ambulan desa
			Kelas ibu hamil melibatkan keluarga ibu hamil
			Deteksi faktor risiko ibu hamil oleh masyarakat

2) Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2020 jumlah absolut kematian bayi sebesar 79 kematian bayi dari 6.510 kelahiran hidup. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2020 sebesar 11 per 1000 kelahiran hidup (73 kematian) masih diatas target sebesar 9,8 per 1000 kelahiran hidup (64 kematian), terjadi peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 7,4 per 1.000 kelahiran hidup. Penghitungan nilai realisasi kinerja capaian AKB tahun 2020 sebesar 89% termasuk kategori Sangat Berhasil.

Kecendrungan pencapaiaan AKB pada lima tahun terakhir 2016-2020 di sajikan dalam gambar berikut :

Grafik : 3.2

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2016 - 2020

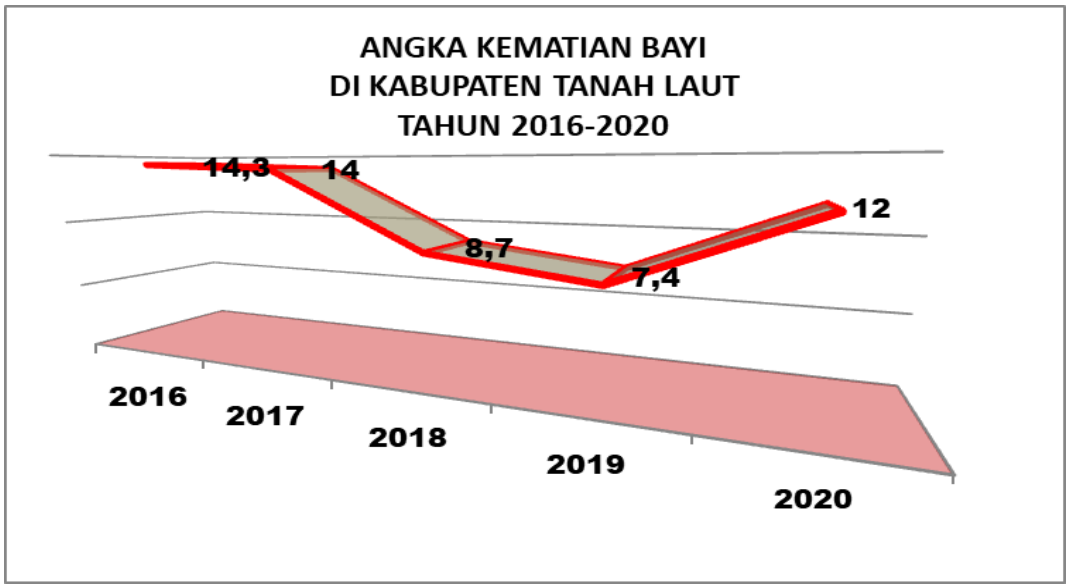

Seluruh kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi. Penyebab kematian bayi tidak terlepas dari kondisi kesehatan ibu saat hamil. Untuk itu sangat terkait kualitas pelayanan kesehatan ibu dengan kejadian kematian bayi. Peningkatan angka kematian terjadi pada semester akhir sebagai dampak dari Pandemi COVID-19.

Hasil audit penyebab kematian bayi secara absolut disajikan pada grafik berikut :

Grafik : 3.3

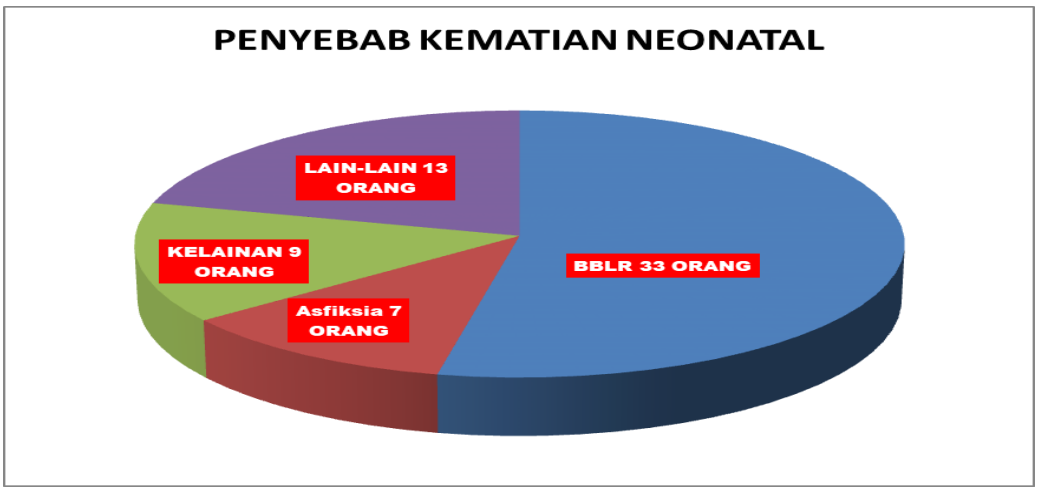

Dari gambar di atas terlihat paling banyak penyebab kematian bayi adalah Berat Badan Lahir Rendah, ini menunjukan adanya kesalahan dalam penanganan gizi sejak bayi dalam kandungan, perlu penanganan yang lebih intensif untuk peningkatan gizi ibu hamil.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian bayi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a) keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melaluiimunisasi pada bayi
b) program perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gerakan 1000 hari pertama kehidupan
c) peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi atau tindak lanjut yang akan dilakukan dalam penurunan kematian bayi sebagai bahan perencanaan program di tahun yang akan datang sebagai berikut:

Tabel 3.6

Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Kematian Bayi dan Rencana Intervensi di Kabupaten Tanah Laut

No	FAKTOR/KENDALA	ANALISA PENYEBAB/KENDALA	TINDAK LANJUT/INTERVENSI
1	Penyakit pada bayi	BBLR	Kunjungan rumah, deteksi dini Bumil beriseko tinggi
			Pemberian makanan Tambahan untuk ibu hamil Kurang Energi Protein
			Penyuluhan perorangan tentang peningkatan gizi ibu hamil
		Asfiksia	Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen

			asfiksia pada neonatus
		Kelainan	Pemberian PMT ibu hamil KEK dan anemia
2	Faktor Ibu	Peningkatan jumlah ibu hamil KEK dan anemia	PMT ibu hamil KEK dan atau anemia
			Pemberdayaan masyarakat melalui posyandu remaja
		Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif	Pendampingan ibu oleh kader dalam pola asuh bayi balita
			Kelas ibu hamil
3	Petugas	Kapasitas petugas dalam skreening bayi beresiko	Drilling KIA (simulasi kegawatan maternal)
			Workshop SOP penanganan BBLR
			Audit Maternal Perinatal bayi
			Penguatan peran bidan desa dalam pemantauan neonatus dan bayi beresiko
			Monev pelaksanaan PISPK
4	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alur rujukan belum sistematis	Implementasi Manual rujukan
		Masih ada sarana dan prasarana Puskesmas tidak sesuai standar	Peningkatan sarana prasarana puskesmas

3) Prevalensi Stunting

Pada tahun 2020 prevalensi stunting (TB/U) pada Balita sebesar 10,67% dari target <27.1% yaitu sebanyak 2.955 orang Balita gizi stunting dari 27,683 Balita yang terentry di EPPGBM. Sebaran

prevalensi stunting yang terbanyak adalah di wilayah kerja Puskesmas Padang Luas sebesar 25,74%, Puskesmas Pelaihari sebesar 23,25% dan Puskesmas Sungai Riam sebesar 16,97%, dari data ini Dinas Kesehatan dapat menentukan lokus untuk penanganan gizi stunting. untuk sebaran prevalensi gizi stunting bisa dilihat pada Grafik berikut:

Grafik : 3.4

Prevalensi Stunting di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

Tahun 2020

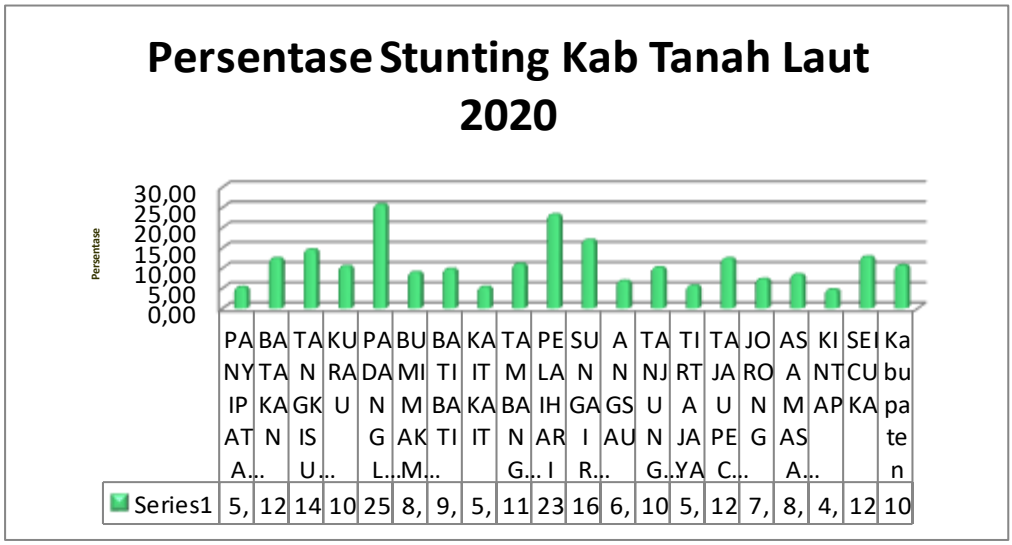

Capaian ini juga sudah melampaui target Kalimantan selatan yaitu dibawah 28%, banyaknya kasus gizi stunting disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga. Pencapaian angka prevalensi gizi stunting ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil (diatas nilai100 %).

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna terus menurunkan Prevalensi stunting Balita pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a) pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi petugas dan kader.
b) implementasi, dukungan dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif, danInisiasi Menyusu Dini (IMD),
c) surveilans gizi, dan pemberian intervensi
d) konsultasi dan pemeriksaan balita oleh dokter ahli

e) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kurus, Bumil KEK.

f) Operasi Timbang

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi atau tindak lanjut yang akan dilakukan dalam penurunan Prevalensi Stunting sebagai bahan perencanaan program di tahun yang akan datang sebagai berikut :

Tabel : 3.7

Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Prevalensi
Gizi Stunting dan Rencana Intervensi
di Kabupaten Tanah Laut

NO	FAKTOR RESIKO	ANALISA PENYEBAB	RENCANA INTERVENSI
1	Balita	Penyakit kongenital	Pemberian PMT pada bumil KEK dan atau anemia
			Pemberian asam folat saat kehamilan
		Infeksi TB Balita, ISPA, dan Diare	Pelacakan dan pengobatan kasus TB
			Kampanye ASI eksklusif
			Promosi PHBS
			Penyuluhan kesehatan lingkungan
			Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen penyakit balita (MTBS)
		Asupan gizi	Pemberian PMT balita gizi buruk dan dan balita kurus
			Survei Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)
			Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan melalui Upaya Peningkatan Gizi Keluarga

			(UPGK)
			Pelatihan kader Pemberian Makanan Bayi dan Anak (Kader PMBA
2	Petugas	Keberlanjutan peningkatan kompetensi petugas	Workshop permasalahan gizi
			Bimtek petugas gizi
			Monev Fasilitator PMBA
			Audit kasus Gizi Buruk
			Monev pelaksanaan PISPK

b) Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar terhadap publik merupakan amanah yang harus terus dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang -undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik tersebut adalah adalah pelayanan di bidang kesehatan.

Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan sangat penting karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat. Kesehatan juga merupakan aspek yang sangat vital dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana terdapat 4 Goals (Gizi Masyarakat, Sistem Kesehatan Nasional, Akses Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana (KB) serta Sanitasi dan Air Bersih), 19 target dan 31 Indikator dalam sektor kesehatan pada SDGs 2015-2030, hal ini dikarenakan kesehatan merupakan indikator perkembangan suatu bangsa. Memperoleh kesehatan merupakan hak setiap individu atau kelompok. Dalam UUD

1945 Pasal 28 H ayat 1, secara eksplisit dikatakan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga.

Dinas Kesehatan telah melaksanakan beberapa program pelayanan kesehatan untuk menciptakan kondisi kesehatan masyarakat agar menjadi lebih baik. Program-program tersebut antara lain berupa subsidi pembiayaan kesehatan, peningkatan sumber daya manusia di sektor kesehatan, peningkatan sumber daya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan manajemen kesehatan. Tujuan program-program tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian apakah selama ini peningkatan kulaitas benar- benar dirasakan oleh masyarakat, hal ini bisa dilihat dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Keluarga Sehat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Indeks Keluarga Sehat adalah merupakan proporsi keluarga sehat / jumlah seluruh keluarga di wilayah tertentu, yang besarannya berkisar antara 0-1. yang dikukur berdasarkan 12 indikator Keluarga Sehat yaitu :

- Keluarga mengikuti program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
- Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0 – 11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, bidan praktek swasta).

- Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi lengkap yaitu: HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio1, Polio2, Polio 3, Polio 4 dan Campak
- Bayi mendapat ASI eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0-6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif).
- Balita mendapatkan pemataуan pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 Bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/buku KIA.
- Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnogsis sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk dokter/petugas kesehatan.
- Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥15 tahun yang didiagnogsis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
- Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
- Anggota keluarga tidak ada yang merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau. Termasuk di sini adalah jika anggota keluarga tidak pernah atau sudah berhenti dari kebiasaan menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.
- Keluarga sudah menjadi anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/atau kartu kepesertaan asuransi kesehatan lainnya.

- Keluarga mempunyai akses sarana air bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
- Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Tabel. 3.8

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	2020			Target Akhir Renstra (2023)
						Target	Capaian	% Capaian	
1	Indeks Keluarga Sehat	0,1	0,13	0,14	0,13	0,8	0,13	16	0,8
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,1	3,42	3,44	83,53	82,9	83,53	101	100

1) Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Tanah laut tahun 2020 adalah 0,13 berarti masih perlu menjadi perhatian dan kerja keras dari Dinas Kesehatan untuk mencapai target yaitu 0,8. Untuk pencapaian indikator ini hanya 16% atau termasuk katagori tidak berhasil, namun dari tabel di atas IKS Kabupaten Tanah laut menunjukan kecendrungan menurun dibanding tahun sebelumnya sebagai salah satu dampak adanya pandemi covid-19 .

Grafik 3.5

Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 – 2020

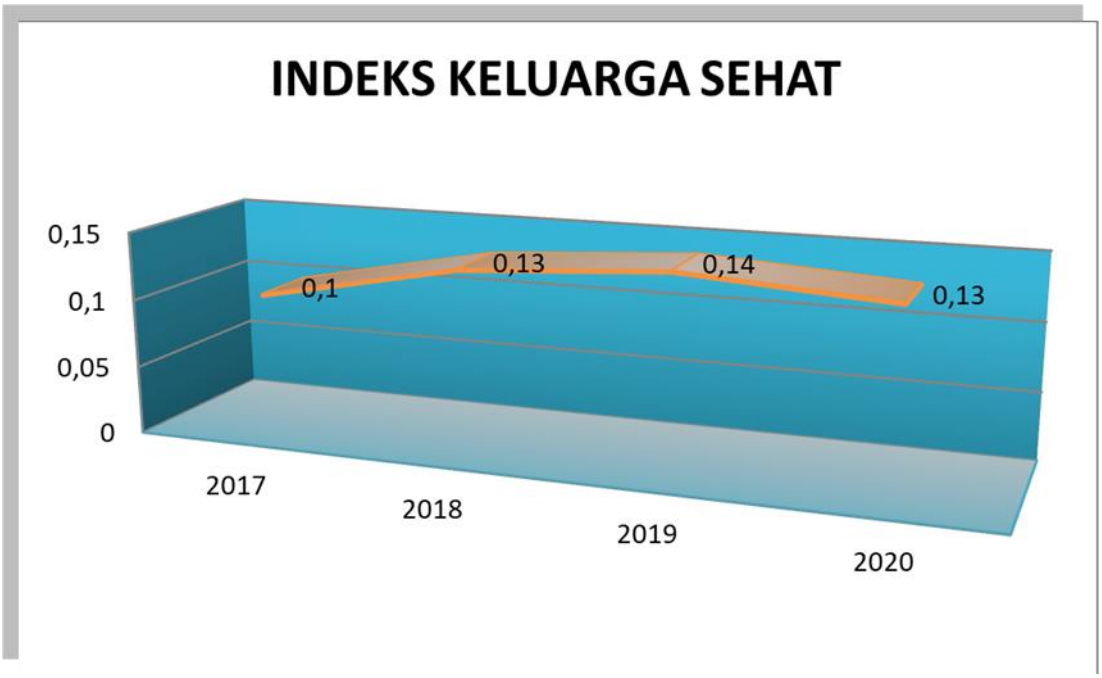

dari 12 indikator keluarga sehat yang paling sulit dicapai adalah Anggota keluarga tidak ada yang merokok, dimana untuk menghilangkan kebiasaan merokok ini dinas kesehatan sudah berusaha melakukan Kampanye anti rokok, melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok, penerbitan Perda Rokok.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2020 mencapai 83,53 sudah berada di atas target yaitu 82,9 atau capaiannya sudah 100% atau dikatagorikan sangat berhasil, dan dari pengukuran IKM selama 4 tahun ada kecendrungan IKM Kabupaten Tanah Laut sedikit menurun di tahun 2020.

Grafik 3.6

Indeks kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanah laut tahun 2017 -2020

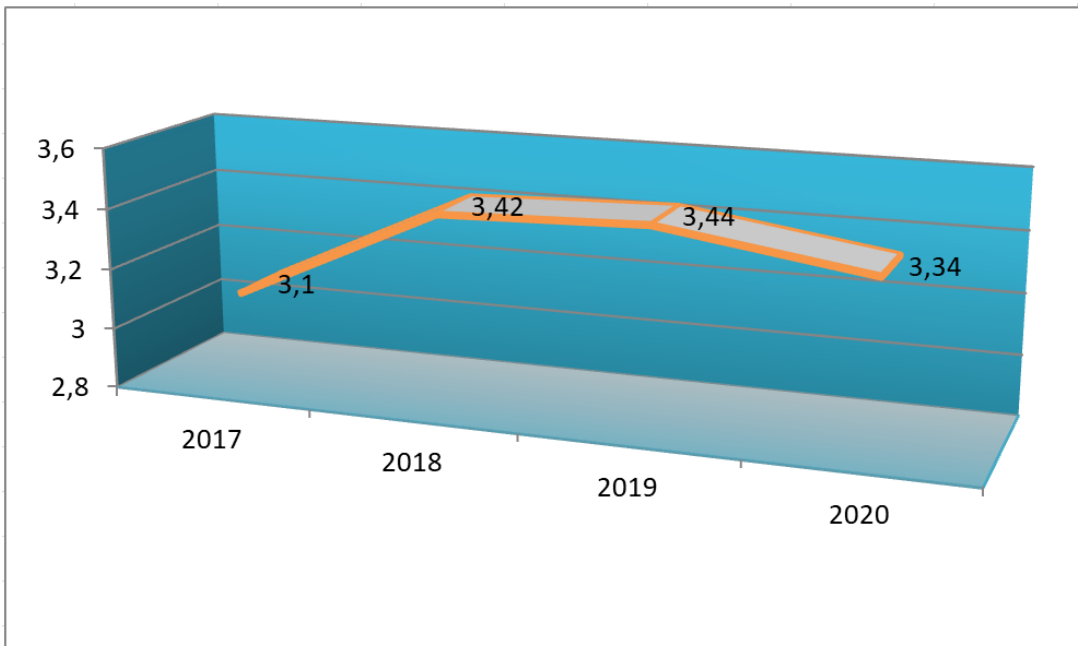

Usaha atau akselerasi Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan Indek kepuasan masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- Penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai.
- Pembangunan baru Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Poskesdes)
- Rehabilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Penyediaan Fasilitas Pendukung Pelayanan kesehatan.
- AkreditasiFasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Kunjungan Petugas kesehatan ke rumah melalui program PIS-PK termasuk kunjungan ke rumah pada kasus kegawat daruratan (on call).
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada mas bencana baik bencana alam maupun non-alam (masa pandemi Covid-19).

3. Eselon III (Sekretaris) A

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 8

Sasaran strategis Nomor 8 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.9

Tabel Sasaran Strategis 8

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisai Kinerja Sasaran pada tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
		2019			2020			2023
Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	70%	74%	100%	71%	71,66%	101%	74%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran capaian kinerjanya rata-**rata 96 % dengan kategori sangat berhasil**. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Aset serta Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020, yang akan dijelaskan per sub bagian/eselon sebagai berikut:

- **Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) A.1**

Tabel. 3.10

Capaian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1. Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP	3	3	100
2 Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar	10	10	100
3 Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	48	27	56
Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
1 Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan kepegawaian sesuai SOP	863	863	100

Kegiatan	Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)	Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian % 5=(4/3)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	1.011.927.170	981.492.920	761.651.658	78 %
2 Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	900.000.000	13.486.210.065	7.277.622.530	54 %
3 Pemelirahaan sarana dan prasarana perkantoran	294.644.100	1.980.494.037	1.117.626.718	56 %
4 Peningkatan kemampuan teknis aparatur	81.250.000	32.330.000	13.649.000	42 %
5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	240.000.000	- (refocusing)	-	-

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut nomor 8 ini dilaksanakan dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kegiatan dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 73 % dengan kategori berhasil.

Kendala terkait pencapaian indikator kinerja Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara yang masih rendah adalah penginventarisasian peralatan dan perlengkapan kantor yang mengalami kerusakan belum maksimal dan terinci.

Saran perbaikan : menginventarisasi peralatan dan perlengkapan perkantoran secara terinci.

Hal-hal yang sudah dilakukan : Membuat pengumuman terkait penginventarisasi peralatan dan perlengkapan perkantoran yeng memerlukan pemeliharaan per bidang

Ketersediaan SDM di seksi Umum dan Kepegawaian terdiri dari Pengemudi/Sopir 1 (satu) orang, Pengadministrasian Umum 1 (satu) orang, Pengelola Kepegawainan 1 (satu) orang, Pengadministrasian Kepegawaian 1 (satu) orang serta tenaga PTT sebanyak 5 (lima) orang,berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) tenaga yang masih dibutuhkan adalah Analis Kepegawaian 1 (satu) orang.

Foto-foto Kegiatan :

penyediaan Rapat koordinasi Dalam/luar daerah (12 Bulan)

pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (13 Jenis)

pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (kendaraan operasional, peralatan gedung kantor)

pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian (863 Berkas)

- **Eselon IV (Kasubbag Keuangan dan Aset) A.2**

Tabel. 3.11

Capaian Kinerja Kasubbag Keuangan dan Aset

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Pelayanan dan Pencatatan Pelaporan Keuangan			
1. Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai SOP	12	12	100
Pelayanan dan Pencatatan Pelaporan Aset			
1 Jumlah pelaporan aset yang disusun sesuai SOP	12	12	100

Kegiatan	Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)	Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian % 5=(4/3)
1	2	3	4	5
1. Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	14.523.800.232,64	21.825.634.697	18.788.286.516	86 %
2 Penyusunan Laporan Keuangan	201.349.000	115.534.200	79.263.600 (69%)	

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut nomor 8 juga dilaksanakan dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD, dengan Kegiatan dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan dan Aset yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 89% dengan kategori sangat berhasil.

Kendala terkait pencapaian indikator kinerja pada sub bagian keuangan dan aset adalah Puskesmas terlambat untuk mengumpulkan laporan bulanan penerimaan yang diminta Dinas Kesehatan. Beberapa Puskesmas terkadang masih ada yang salah dalam menyusun laporan sehingga perlu dikembalikan utk diperbaiki, sehingga memperlambat selesainya laporan bendahara penerimaan dinkes. Terdapat keterlambatan dalam proses peng entrian SPJ oleh PKM shg menghambat proses penyusunan laporan bendahara pengeluaran di dinas kesehatan

Saran perbaikan : mengingatkan secara resmi melalui surat tertulis kepada Puskesmas untuk tertib nya sistem pelaporan

Rencana Aksi : Pertemuan dengan bendahara Puskesmas di tahun 2021 membahas kelengkapan pelaporan rutin

Hal-hal yang sudah dilakukan : Menghimbau puskesmas utk menumpulkan laporan tepat waktu melalui group bendahara Puskesmas, menghimbau utk lbh teliti dalam menyusun lap dan melakukan peng entrian SPJ tepat waktu.

Ketersediaan SDM di sub bagian keuangan dan aset terdiri dari Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1 (satu) orang, Analis Keuangan 1 (satu) orang, Pengelola Keuangan 1 (satu) orang, Pengadministrasian Keuangan 3 (tiga) orang, dam Bendahara 1 (satu) orang. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan 2 (dua) org verifikator minimal lulusan D3 mengingat beban kerja

verifikator di subbag keuangan yang cukup besar dan belum didukung ketenagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Foto-foto kegiatan :

1. Laporan Keuangan

2. Laporan Aset

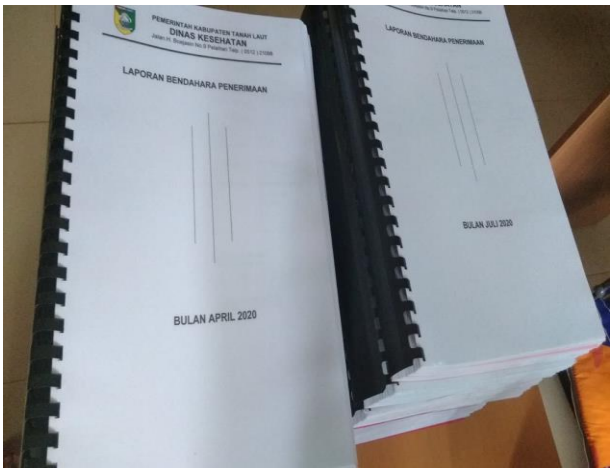

- **Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan) A.3**

Tabel. 3.12.

Capaian Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1. Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat sesuai standar	4 dokumen	4 dokumen	100%
2 Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kegiatan	Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)	Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian % 5=(4/3)
1	2	3	4	5
1. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	35.000.000	35.000.000	11.030.000	32 %
2 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	24.970.000	35.025.000	22.865.000	65 %

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut nomor 8 juga dilaksanakan dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan Kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dan Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja serta Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan yang telah dijelaskan diatas.

Pada tahun 2020 dilaksanakan Reviu SAKIP Tahun 2019 BPKAD Kabupaten Tanah Laut terhadap 9 dokumen SAKIP BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 dan telah mendapatkan Nilai BB (71,66) dari target nilai 71, dengan demikian capaian kinerja Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut mengalami peningkatan kinerja.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 74,3 % dengan kategori berhasil.

Kendala terkait pencapaian indikator kinerja pada sub bagian perencanaan dan pelaporan adalah kesulitan pengumpulan data dari pemegang program, kurang terintegrasinya data program,dan keterlambatan usulan anggaran dari masing-masing bidang dan Puskesmas serta Rumah Sakit.

Saran perbaikan : mengingatkan secara resmi melalui surat tertulis kepada bidang-bidang, Puskesmas dan Rumah Sakit untuk tertib nya sistem pelaporan dan usulan anggaran.

Rencana Aksi : Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) capaian kinerja bidang-bidang, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Hal-hal yang sudah dilakukan : Menghimbau puskesmas utk mengumpulkan laporan tepat waktu melalui group Kepala Puskesmas/Kepala Tata Usaha (KTU), menghimbau untuk lebih teliti dalam menyusun laporan dan melakukan pengusulan anggaran tepat waktu.

Ketersediaan SDM di sub bagian perencanaan dan pelaporan terdiri dari Pengelola Bahan Perencanaan 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 3 (tiga) orang, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan tenaga Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan dan Tenaga Pengadministrasian Perencanaan dan Program.

Foto-foto kegiatan :

1. Dokumen perencanaan

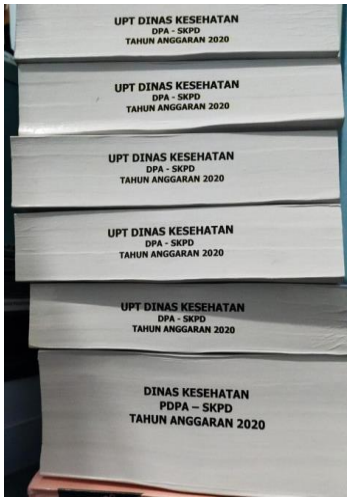

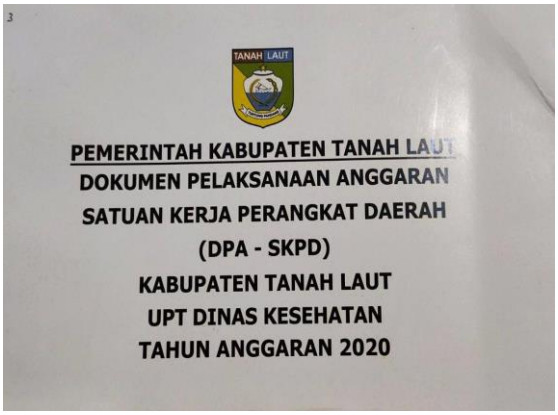

2. Dokumen Pelaporan

4. Eselon III (Kepala Bidang) B

- **Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat**

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1, 2, 3 dan 4

Sasaran strategis Nomor 1, 2, 3 dan 4 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.13

Tabel Sasaran Strategis 1,2,3 dan 4

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisai Kinerja Sasaran pada tahun ke						
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
				2019			2020			2023
1	Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	80%	85%	100%	85%	80%	94%	100%
			2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	80%	98%	100%	85%	90%	100%	100%
			3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	90%	97%	100%	92%	96%	100%	100%
			4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	88%	78%	89%	90%	77%	86%	100%
		Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	40%	60%	100%	40%	45%	113%	60%
			2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	75%	75%	100%	27%	27%	100%
		Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa STBM	32,3%	61%	54%	53,80%	71%	132%	100%
			2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	61%	76%	80%	61%	77%	80%
			3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	74%	100%	70%	81%	116%	70%
		Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel diatas menjelaskan **rata-rata pencapaian kegiatan 88 % dengan kategori sangat berhasil**. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 1, 2. 3 dan 4 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 yang akan dijelaskan per seksi/eselon sebagai berikut:

- **Eselon IV (Kepala Seksi Promosi Kesehatan) B.1**

Tabel.3.14

Capaian Kinerja Kepala Seksi Promosi Kesehatan

Indikator Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah Pembinaan Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	19 Puskesmas	19 Puskesmas	100%
2	Jumlah penyediaan media Promosi Kesehatan	22 Media	22 Media	100%
3	Jumlah Rumah Tangga berPHBS	3.000 Rumah Tangga	1.680 Rumah Tangga	64%
4	Jumlah Desa Siaga Aktif	135	135	100%
5	Jumlah pembinaan kemitraan dan Koordinasi dengan UKBM (kali)	8	4	50%
6	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	19 Sekolah Dasar	19 Sekolah Dasar	100%

Kegiatan Dalam	Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)	Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian % 5=(4/3)
1	2	3	4	5
1. Pembinaan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	538.650.000	268.587.000	180.100.000	67 %
2 Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	17.430.309.000	17.430.309.000	10.954.554.632 (63%)	

Dalam rangka mendukung sasaran strategis yang di ampu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat nomor 2 dilaksanakan oleh Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan dan Program Bantuan Operasional Kesehatan, dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Promosi Kesehatan yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 86 % dengan kategori sangat berhasil.

Indikator yang belum mencapai target:

1. **Indikator jumlah pembinaan kemitraan dan koordinasi dengan UKBM hanya 50%**
   - Kendala : Dikarenakan pandemi Covid-19 banyak kegiatan yang Usaha Kesehatan yang Berbasis Masyarakat (UKBM) tidak dapat dilakukan, antara lain : Posyandu, UKS dan lain-lain.
   - Saran perbaikan : Semua kegiatan UKBM dilakukan dengan cara menjemput bola dengan arti kegiatan Posyandu dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan datang ke rumahwarga dan yang dilakukan hanyalah penimbangan balita saja.
   - Rencana Aksi/Rencana Tindak lanjut : Kegiatan UKBM akan dilakukan dengan cara melatih petugas yang melaksanakan kegiatan untuk menggunakan google form untuk melakukan kegiatan penjaringan kesehatan pada usia pendidikan dasar dan kegiatan yang dapat difasilitasi dengan menggunakan google form.
   - Hal - hal yang sudah dilakukan : Ada sebagian petugas dalam pelaksanakan kegiatan UKBM sudah menggunakan google form untuk melakukan penjaringan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar.

2. **Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) hanya 64%**
   - Kendala: adanya Pandemi COVID-19 dimulai pada bulan Maret tahun 2020 kegiatan survei PHBS hanya sempat dilakukan pada

awal Tahun 2020 sebelum adanya pembatasan kegiatan dikarenakan pandemi COVID-19.

- Saran perbaikan : dilakukan Survei PHBS dengan cara elektronik atau diuji coba menggunakan google form untuk melakukan survei PHBS.
- Rencana aksi/tindak lanjut: melakukan kegiatan survei PHBS dengan menggunakan protokol kesehatan dan dicoba menggunakan google form untuk mengisi survei PHBS yang akan dilakukan di Tahun 2021.
- Hal-hal yang sudah dilakukan : Melakukan kegiatan informasi dan edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan menggunakan media elektronik dan media sosial agar masyarakat lebih mengerti pentingnya Perilaku hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari terutama pada saat pandemi COVID-19 saat ini.

Ketersediaan SDM di Seksi Promosi Kesehatan terdiri dari Analis Data dan Informasi 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 2 (dua) orang, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan tenaga Pengolah Data Penyuluhan dan Pelayanan Informasi 1 (satu) orang, Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan 1 (satu) orang dan Pengadministrasi Umum 1 (satu) orang.

Contoh Foto-Foto Kegiatan :

- **Eselon IV (Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga) B.2**

Tabel. 3.15

Capaian Kinerja Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4		
	Meningkatkan Kesehatan Lingkungan.	**Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga**			
		1. Jumlah desa yang melaksanakan STBM	122		71
		Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Tempat Tempat Umum			
		1. Jumlah TTU yang memenuhi Persyaratan Kesehatan	1254	768	61,24
		Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Tempat Pengelolaan Makanan			
		1. Jumlah TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	70	57	81
		2. Jumlah Industri Rumah Tangga yang mempunyai sertifikat PIRT	75	45 sertifikat	60

	Meningkatkan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	**Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja**			
		1. Jumlah orang yang dilayani tes kebugaran	250	345 orang	138
		2. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja	19	19 laporan	100
		Monitoring Pelayanan Kesehatan Olah Raga			
		1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Olah Raga	19	19 laporan	100

Kegiatan	**Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)**	**Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Capaian % 5=(4/3)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	582.000.000	600.000.000	431.819.500	72

Dalam rangka mendukung sasaran strategis yang di ampu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat nomor 3 dan 4 dilaksanakan oleh Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 85,2 % dengan kategori sangat berhasil.

Indikator yang belum mencapai target 100%:

1. **Indikator jumlah Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM hanya 71 %**

a. Kendala: Recofusing Dan Pandemi Yang Menyebabkan Banyak Kegiatan Di Desa Di Tiadakan Karena Kegiatan Stbm Banyak Melakukan Aksi Di Desa, Tidak Ada Lagi Tenaga Fasilitator STBM Kabupaten.
b. Saran perbaikan : Melakukan Inovasi kegiatan agar tetap berjalan di masa Pandemi COVID-19.
c. Rencana aksi/tindak lanjut: Membuat Perbup STBM Di Tahun 2021.
d. Hal-hal yang sudah dilakukan : Sudah Membuat Draft Perbup STBM Tahun 2021.

2. Indikator Jumlah Tempat Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan (61%)

a. Kendala: Recofusing Dan Pandemi Yang Menyebabkan Banyak Kegiatan Pendataan Dan Pembinaan Penyehatan TTU di tiadakan Tahun 2020
b. Saran perbaikan : Melakukan Inovasi kegiatan agar tetap berjalan di masa Pandemi COVID-19.
c. Rencana aksi/tindak lanjut: melakukan penambahan kegiatan terkait penyehatan TTU di anggaran 2021.
d. Hal-hal yang sudah dilakukan : melakukan penambah kegiatan terkait penyehatan TTU di anggaran 2021.

3. Indikator Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan (81%)

a. Kendala: Recofusing Dan Pandemi Yang Menyebabkan Banyak Kegiatan Pendataan Dan Pembinaan Penyehatan TPM di tiadakan Tahun 2020.
b. Saran perbaikan : Melakukan Inovasi kegiatan agar tetap berjalan di masa Pandemi COVID-19.
c. Rencana aksi/tindak lanjut: melakukan pembinaan kepada puskesmas terkait penyelenggaraan penyehatan TPM di kawasan wilayah puskesmas.

d. Hal-hal yang sudah dilakukan : melakukan penambahan kegiatan terkait penyehatan TPM di anggaran 2021.

4. Indikator Jumlah Industri Rumah Tangga Yang Mempunyai Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) (60%)

a. Kendala: Recofusing dan Pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kegiatan pendataan dan pengelolaan kepada pelaku usaha industri rumah tangga di tiadakan.
b. Saran perbaikan : Melakukan Inovasi kegiatan agar tetap berjalan di masa Pandemi COVID-19.
c. Rencana aksi/tindak lanjut: Menambah jumlah peserta penyuluhan keamanan pangan di dinas kesehatan untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan terkait salah satu syarat untuk membuat sertifikat PIRT.
d. Hal-hal yang sudah dilakukan : Sudah menambah anggaran pagu di tahun 2021 untuk kegiatan penyuluhan keamanan pangan.

Ketersediaan SDM di Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga terdiri dari Pengelola Kesehatan Lingkungan 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 2 (dua) orang, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan tenaga Analis Kesehatan Kerja 1 (satu) orang dan Pengadministrasi Umum 1 (satu) orang.

Contoh Foto-Foto Kegiatan

START

ENAK & HALAL

NG MAS PERMAI

- **Eselon IV (Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat) B.3**

Tabel. 3.16

Capaian Kinerja Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (pusdatin)	Realisasi	% 6=5/4 (pusdatin)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	Jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar	6065 (7490)	6012	80,30
		Jumlah ibu bersalin yang dilayani sesuai standar	6121 (7149)	6464	90,40
		Jumlah Ibu Hamil KEK yang mendapat pemberian Makanan Tambahan	(1064)	1010	94,9
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang dilayanai sesuai standar	6254 (6809)	6529	95,9
		Jumlah Balita Gizi Kurus (Wasting) yang dilayani sesuai satndar	(1004)	1004	100
		Jumlah Balita Gizi Kurang yang mendapat Pemberian Makanan Tamabahan	(1343)	1343	100
		Jumlah Dokumen Pemetaan Status Gizi yang sesuai standar	(19 Puskesmas)	19 Puskesmas	100
		Jumlah Kematian Ibu dan Anak yang di evaluasi		(Ibu=8 orang Anak=79 orang)	100

Kegiatan	**Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)**	**Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Capaian % 5=(4/3)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Pernbinaan, Pengembangan dan Pemberdaya	9.799.421.000	6.408.291.200	4.884.022.005	76

	an Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (DID				
2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	350.000.000	175.071.900	146.462.352	84
3	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	2.103.789.000	2.103.789.000	1.197.098.029	57
4	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	77.781.000	77.781.000	63.029.088	81

Dalam rangka mendukung sasaran strategis yang di ampu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat nomor 1 (satu) dilaksanakan oleh Kegiatan Pernbinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dengan rincian kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 81,31 % dengan kategori berhasil.

Kendala : adanya Pandemi COVID-19 terjadi peningkatan kasus kematian Ibu maupun Bayi.

Saran perbaikan : melaksanakan inovasi kegiatan di masa Pandemi COVID-19

Rencana Aksi : melaksanakan kegiatan yang bisa dilaksnakan secara daring

Hal-ha yang sudah dilakukan ;

Mebuat surat ke UPT Puskesmas terkait kegiatan pelayanan program kesga, melakukan evaluasi kegiatan melalui daring terhadap masalah yang muncul, melakukan koordinasi dengan tim AMP kabupaten terkait kematian ibu dan Bayi.

Ketersediaan SDM Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat terdiri dari Analis Kesehatan Ibu dan Anak 1 (satu) orang, Pengelola Program Kesehatan Keluarga 3 (tiga) orang, Analis Gizi 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 2 (dua) orang, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan Pengadministrasi Umum 1 (satu) orang.

Contoh Foto-Foto Kegiatan:

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

Kunjungan Ibu Nifas

Penilaian Kinerja Bidan

Balita Gizi Buruk / Wasting yang Mendapatkan Pelayanan dan PMT

Balita Gizi Buruk / Wasting yang di lakukan pengukuran

Pemberian PMT pada balita wasting

Pemberian PMT dan pengukuran BB dan TB pada balita wasting

Balita Gizi kurang/Underweight dapat PMT

Pemberian PMT pada balita gizi kurang/Underweight

Ibu Hamil Mendapatkan PMT

Ibu Hamil KEK Mendapatkan PMT

Ibu Hamil KEK Mendapatkan PMT

➢ **Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 7

Sasaran strategis Nomor 7 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.17

Tabel Sasaran Strategis 7

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisai Kinerja Sasaran pada tahun ke						
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
				2019			2020			2023
		Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	60%	56%	100%	65%	100%	100%	80%
			2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	84%	90%	100%	89%	100%	100%	100%
			3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	85%	90%	100%	87%	100%	100%	100%
			1. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	56%	56%	100%	60%	60%	100%

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan **90 % dengan kategori sangat berhasil**. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Farmasi dan Alkes serta Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020, yang akan dijelaskan per seksi/eselon sebagai berikut:

- **Eselon IV (Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan) B.4**

Tabel. 3.18

Capaian Kinerja Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %	Keterangan
1. Jumlah Pembangunan gedung fasilitas kesehatan sesuai standar	5 buah	4 buah	80%	Target belum disesuaikan dengan hasil refocusing
2 Jumlah Pengadaan Prasarana Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21 buah	32 buah	100%	Target belum disesuaikan dengan hasil refocusing
3 Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19 buah	4 buah	21%	Target belum disesuaikan dengan hasil refocusing
4 Jumlah Pemeliharaan sarana dan Prasa rana	10 buah	0 buah	0	Target belum disesuaikan dengan hasil refocusing

Kegiatan	Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)	Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian % 5=(4/3)
1	2	3	4	5
1. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.720.900.000	9.532.810.000,-	5.313.448.200	56%
2 Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK Fisik)	4.888.075.000	4.888.075.000	4.801.204.350	98%

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dilaksanakan juga oleh Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

(Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan), dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 71 % dengan kategori berhasil.

Kendala : Target belum sesuai, prioritas kebutuhan sesuai anggaran, dan terdapat refocusing anggaran di 2020 difokuskan untuk kegaiatan penanganan Pandemi COVID-19.

Saran perbaikan : Tetap merencanakan dan mengusulkan anggaran kegiatan untuk pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rencana Aksi : Melakukan pendataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di semua UPT Dinas Kesehatan

Hal-hal yang sudah dilakukan : Merekapitulasi fasilitas pelayanan kesehatan yang memerlukan rehabilitasi maupun pemenuhan kebutuhan sumber daya lainnya.

Ketersediaan SDM Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana 1 (satu) orang, Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 1 (satu) orang, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan Tenaga Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana 1 (satu) orang.

Foto-Foto Kegiatan :

A. Pembangunan gedung fasilitas kesehatan sesuai standar

1. Pembangunan Ruang Jenazah RSUD KH Mansyur Kintap

2. Pembangunan Gudang RSUD KH Mansyur Kintap

3. Pembangunan Pembangunan Rumah Dinas Dokter I dan II RSUD KH Mansyur Kintap

4. Pembangunan Pembangunan Ruang Penunjang RSUD KH Mansyur Kintap

B. Pengadaan Prasarana Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rekapitulasi Pengadaan Prasarana Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2021

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME	LOKASI	BESARAN KONTRAK/REALISASI	REALISASI	NO KONTRAK/KWITANSI	JANGKA WAKTU KONTRAK (TGL MULAI s.d AKHIR PEKERJAAN)	PENYEDIA
1	Pengadaan Filling Kabinet	32.000.000	10 bh	Puskesmas Angsau	31.750.000	31.750.000	027/12/Brg-EP/2020	131 hari (24 Juni s.d 1 November 2020)	PT. Datascrip
2	Pengadaan Genset Minimal 10 KVA	80.000.000	1 set	Puskesmas Angsau	79.271.500	79.271.500	027/02-PL/GENSET/2020	60 hari (11 Juni s.d 9 Agustus 2020)	CV. Dian Samudera
3	Pengadaan Meja Rapat	60.000.000	20 bh	Puskesmas Angsau	60.000.000	132.000.000	027/11/Brg-EP/2020	60 hari (22 Juni s.d 20 Agustus 2020)	PT. Karya Mitra seraya
4	Pengadaan Meja Tulis	72.000.000	24 bh	Puskesmas Angsau	72.000.000		027/11/Brg-EP/2020	60 hari (22 Juni s.d 20 Agustus 2020)	PT. Karya Mitra seraya
5	Pengadaan Kursi Rapat	24.500.000	35 bh	Puskesmas Angsau	20.973.000	88.473.000	027/14/Brg-EP/2020	90 hari (24 Juni s.d 21 September 2020)	PT. Deka Sari Perkasa
6	Pengadaan Kursi Tunggu	67.500.000	15 bh	Puskesmas Angsau	67.500.000		027/14/Brg-EP/2020	90 hari (24 Juni s.d 21 September 2020)	PT. Deka Sari Perkasa
7	Pengadaan Sofa	11.000.000	1 set	Puskesmas Angsau	9.520.000	9.520.000	072/VII/CV.Nudi Karya Banua/2020	60 hari (14 Juli s.d 11 September 2020)	CV.Nudi Karya Banua
8	Pengadaan Lemari Arsip	60.000.000	15 bh	Puskesmas Angsau	57.530.000	57.530.000	027/13/Brg-EP/2020	131 hari (24 Juni s.d 1 November 2020)	PT. Datascrip
9	Pengadaan Kursi Kerja	26.000.000	40 bh	Puskesmas Angsau	22.620.000	22.620.000	027/10/Brg-EP/2020	60 hari (22 Juni s.d 20 Agustus 2020)	PT.Young Industry Indonesia
10	Pengadaan Alat Pendingin AC Unit	55.100.000	10 bh	Puskesmas Angsau	53.703.650	53.703.650	027/01-PL/AC/2020	60 hari (19 Mei s.d 17 Juli 2020)	CV. Dian Samudera
11	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	5.250.000	7 bh	Puskesmas Angsau	3.465.000	3.465.000	10/VI/CV. Berkat Saudara/2020	09 Juni 2020	CV.Berkat Saudara

12	Pengadaan Meja Kerja Pejabat	7.000.000	2 Bh	Puskesmas Angsau	6.166.000	6.166.000	027/18/Brg-EP/2020	60 hari (25 Juni s.d 23 Agustus 2020)	PT.Karya Mitra Seraya
13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Angsau	500.000.000	1 Unit	Puskesmas Angsau	495.000.000	495.000.000	027/04/Tender/SP/Dinkes/2020	150 hari (7 Juli s.d 3 Desember 2020	CV.Pradipta Surya aji
14	Pengadaan Meja Kerja	55.000.000	25 Bh		52.500.000	52.500.000		60 hari (07/10/2020 s.d 05/12/2020)	PT.Deka Sari Perkasa
15	Pengadaan AC unit 3/4 Pk	24.000.000	4 Bh	Dinkes (1) Puskesmas Batakan (3)	23.893.100	23.893.100	546		Toko Satelit
16	Pengadaan Sound System	20.000.000	1 Set	Dinkes	19.815.000	19.815.000	682		Toko Satelit
17	Pengadaan Komputer (PC)	18.000.000	2 Bh	Dinkes	17.200.000	17.200.000	501		Ar Rahman Computer
18	Pengadaan Laptop	8.000.000	1 Bh	Dinkes	6.100.000	6.100.000	543		Ar Rahman Computer
19	Pengadaan Printer	5.300.000	2 Bh	Dinkes	5.300.000	5.300.000	544		Ar Rahman Computer
20	Pengadaan Proyektor + Attachment	14.000.000	1 bh	Dinkes	13.296.000	13.296.000	1089		CV.Telaga Mas
21	Pembangunan Rumah Genset RSUD KH Mansyur Kintap	45.000.000	9 m2	Kec.Kintap,Desa Kintapura	44.300.000	44.300.000	027/ 2-PL/SPK/Dinkes/2020	90 hari (29/4/2020 s.d 28/7/2020)	CV. KARYA DILLA ADITAMA
22	Pembangunan Parkir Ambulan RSUD KH Mansyur Kintap	180.000.000	90 m2	Kec.Kintap,Desa Kintapura	177.400.000	177.400.000	027/1-PL/SPK/Dinkes/2020	90 hari (29/4/2020 s.d 28/7/2020)	CV. KARYA DAFFA ADICITRA

23	Pembuatan Pagar RSUD KH Mansyur Kintap	297.500.000	170 m2	Kec.Kintap,Desa Kintapura	292.000.000	292.000.000	027/06-Tender/SP/Dinkes/2020	65 hari (6/10/2020 s.d 10/12/2020)	CV.Telaga Mas
24	Pengaspalan Jalan Lingkungan RSUD KH Mansyur Kintap	360.000.000	1.200 m2	Kec.Kintap,Desa Kintapura	351.898.000	351.898.000	027/07- Tender/SP/Dinkes/2020	65 hari(6/10/2020 s.d 9/12/2020)	CV.Anugrah Jaya Pratama
25	Study Kelayakan RSUD tipe D Kecamatan Bumi Makmur	95.000.000	1 dok		94.000.000	94.000.000	027/ 4-PL/JPK/SPK/Dinkes/2020	30 hari (13/11/2020 s/d 12/12/2020)	CV.DAYA UTAMA KONSULTAN
26	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Master Plan dan DED Pembangunan di Kecamatan Pelaihari	83.300.000	1 dok		82.537.000	82.537.000	027/1/PL/JKK/SPK/DINKES/2020	90 hr (17/9/2020 s.d 15/12/2020	CV.Tala Muda Cipta Konsultan
27	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Master Plan dan DED Pembangunan di Kecamatan Bati-Bati	83.300.000	1 dok		82.702.000	82.702.000	027/3/PL/JKK/SPK/DINKES/2020	90 hr (17/9/2020 s.d 15/12/2020	PT.Kula Banua Konsultan
28	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Master Plan dan DED Pembangunan di Kecamatan Batu Ampar	83.300.000	1 dok		82.619.000	82.619.000	027/2/PL/JKK/SPK/DINKES/2020	90 hr (17/9/2020 s.d 15/12/2020	CV.Tala Muda Cipta Konsultan
29	Belanja Modal Tanah- Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa								
30	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Rumah Sakit di Kecamatan Bumi Makmur	531.000.000	20.000 m2		491.896.000	491.896.000			
31	Konsultan Appraisal	50.000.000	1 paket	Bumi Makmur	46.288.000	46.288.000	027/2-PL/JK/SPK/Dinkes/2020	30 hari (26/10/2020 s/d 25/11/2020)	KJJP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan
32	Penambahan Daya Listrik Pustu Bumi Jaya dai 450 menjadi 2200 KVA	5.000.000	1 bh	Bumi Jaya	4.960.000	4.960.000	010/XI/Penambahan Daya Listrik/CV.Ghanaten/2020		CV. Ghanaten

Foto Pengadaan Prasarana Penunjang Fasilitas Pelayanan Keseha

1. Pengadaan AC

2. Pengadaan IPAL

3. Kursi Rapat

4. Kursi Kerja

5. Lemari Arsip

6. Filling Kabinet

7. Genset

8. Meja Rapat

9. Sofa

10 Pengadaan IPAL

10. Rumah Genset

11. Pengasapalan Jalan RSUD KH. Mansyur

12. Pembangunan Pagar RSUD KH. Mansyur

13. Pembangunan Parkir RSUD KH. Mansyur

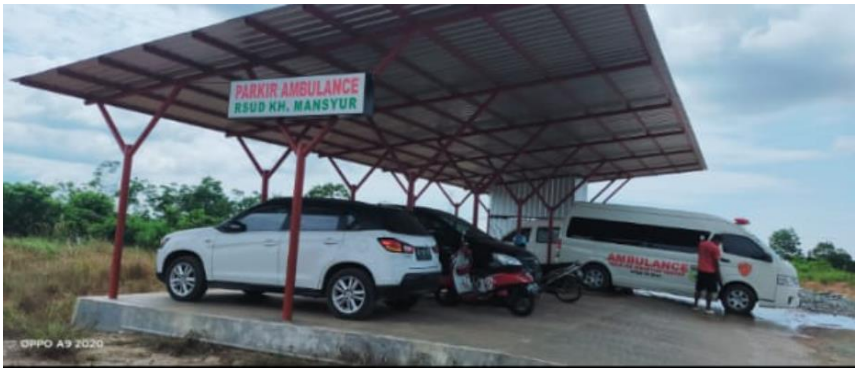

B. Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Penambahan Gedung dan Rehabilitasi Puskesmas Angsau

2. Rehabilitasi Total/Pembangunan Baru Pustu Liang Anggang

- **Eselon IV (Kepala Seksi Farmasi dan Alkes) B.5**

Tabel. 3.19

Capaian Kinerja Kepala Seksi Farmasi dan Alkes

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %	Keterangan
Melaksanakan Penyediaan Alat Kesehatan dan Kelarmasian				
1. Jumlah Puskesmas dengan alat kesehatan yang lesuai standar	19	19	100	
2 Jumlah jenis pengadaan alat sesuai standar	5	5	100	
Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan				

1	Jumlah Jenis Alat Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi	5	5	100	
	Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kefarmasian				
1	Jumlah jenis pengadaan obat dan bahan medis habis pakai yang sesuai formularium nasional	5	5	100	
2	Jumlah Puskesmas yang melaporkan stok opname obat sesuai standar	19	19	100	
3	Jumlah pengadaan obat dan bahan habis medis pakai sesuai formularium nasional	197	197	100	

Program **(Kegiatan)**	**Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni)** **(Rp)**	**Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan)** **(Rp)**	**Realisasi** **(Rp)**	**Capaian %** **5=(4/3)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
. **Program Pembinaan Pengeembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan**				

	Kesehatan dan SDM Kesehatan)				
1	Pembinaan, pengembangan kefarmasian dan alat kesehatan	3.980.500.000	6.445.500.000	4.219.903.188	65
	Program Upaya Kesehatan				
1	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (penutunan stunting DAK Penugasan)	478.840.000	478.840.000	464.875.299	97
2	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK Reguler)	1.781.098.000	1.781.098.000	1.389.630.432	78

○

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dilaksanakan juga oleh Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan), dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Farmasi dan Alkes yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 93 % dengan kategori sangat berhasil.

Kendala : Ada bebarpa kontrak yang tidak terealisasi akibat pendemi krn bahan baku obat import dari cina dan india, kalibrasi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu menyediakan kelengkapan yang dipersyaratkan oleh LPFK banjarmasin, ada beberapa puskesmas belum memiliki alat kesehatan sesuai standar ASPAK.

Saran perbaikan : kalibrasi dan pengadaan obat-obatan dilaksanakan lebih awal, diharapkan e katalog dapat lebih cepat dan lengkap tayangnya, pengadaan alkes sesuai standar.

Rencana Aksi: melakukan RAB dan peng klik kan e katalog lebih awal, melakukan peng inputan Data ASPAK, pengadaan alkes sesuai standar.

Hal-Hal yang sudah dilakukan : melakukan pendataan kebutuhan obat (RKO), melakukan peng inputan Data ASPAK, pengadaan alkes sesuai standar,

Ketersediaan SDM Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan terdiri dari Analis Data dan Informasi 1 (satu) orang, Pengelola Kefarmasian 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 2 (satu) orang, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan Tenaga Pengelola Pengelola Obat-Obatan dan Alat Kesehatan 1 (satu) orang dan Pengadministrasian Umum 1 (satu) orang

Contoh Foto-Foto Kegiatan :

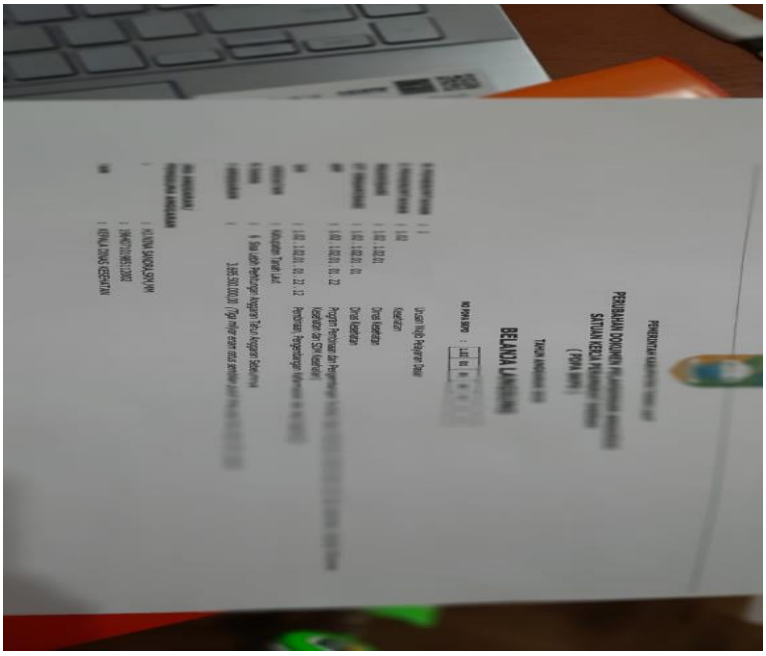

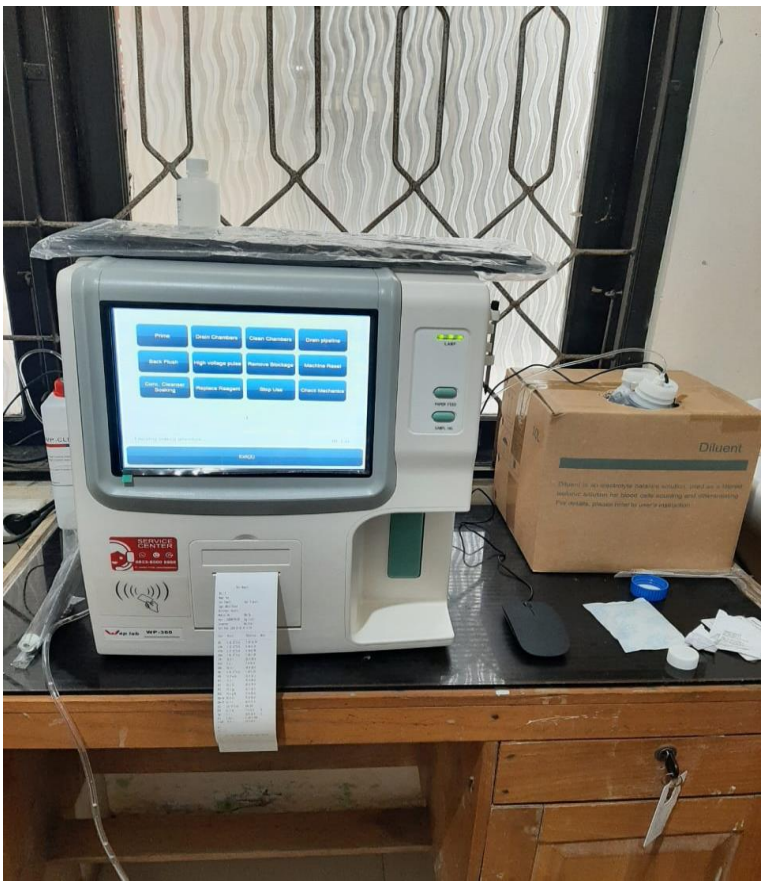
Diluent

- **Eselon IV (Kepala Seksi SDMK) B.6**

Tabel.3.20

Capaian Kinerja Kepala Seksi SDMK

Indikator Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	250	75	30
2	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/kursus/pelatihan dan bimbingan teknis	60	40	66

Kegiatan		Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)	Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian % 5=(4/3)
1		2	3	4	5
1.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	456.600.000	560.554.200	267.715.000	48

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dilaksanakan juga oleh Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan), dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi SDMK..

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 48 % dengan kategori tidak berhasil. Perlu melakukan peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan baik dari segi penganggaran maupun

inovasi kegiatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Kendala : terdapat refocusing anggaran di 2020 difokuskan untuk kegaiatan penanganan Pandemi COVID-19, untuk uji kompetensi ASN yang akan naik naik jabatan tidak sebanyak target, Sarana Prasarana terkait Aplikasi Renbut dan Si-SDMK yang masih kurang (Wifi dan Laptop).

Saran perbaikan : usulan penambahan pagu anggaran kegiatan di tahun 2021, sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi (UKOM)

Rencana Aksi : Pelaksanaan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas, Digitalisasi UKOM, pertemuan Koordinasi terkait SIP (Surat Izin Praktik),

Hal-hal yang sudah dilakukan : UKOM secara manual, melakukan pengusulan anggaran

Ketersediaan SDM : analis perencanaan SDM Aparatur 1 (satu) orang, Pengelola SDMK 1 (satu) orang, Pengelola Profesi SDMK 1 (satu) orang, sesuai Berdasrkan Analisis Beban Kerja (ABK) SDM yg masih kurang Pengadministrasian Umum 1 (satu) orang

Sarpras yang kurang laptop dan Wifi.

Contoh Foto-Foto Kegiatan :

➢ **Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 5

Sasaran strategis Nomor 5 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel.3.21

Tabel Sasaran Strategis 5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada tahun ke						
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
				2019			2020			2023
		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	52%	52%	100%	57%	57%	100%
			2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	90%	90%	100%	80%	80%	100%

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan **79 % dengan kategori berhasil**. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Seksi Surveilans dan Imunisasi, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020.

- **Eselon IV (Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi) B.7**

Tabel.3.22
Capaian Kinerja Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah desa UCI	135	108	80,00
2	Jumlah Bayi Imunisasi dasar lengkap	5873	5016	85,41
3	Jumlah desa KLB yang di tanggulangi sesuai standar	12	1	8,3
4	Jumlah desa yang bebas KLB penyakit menular	123	134	108,9
5	Jumlah jemaah haji yang mendapat layanan kesehatan haji sesuai SOP	250	307	122,8
6	Jumlah Puskesmas yang aktif melaporkan kegiatan surveilans dan capaian imunisasi	19	19	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)	Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian % 6=(5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Imunisasi, Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	315.705.000	315.705.000	30.459.606	9,64
2	Peningkatan Imunisasi, Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DID)	9.384.370.000	9.384.370.000	5.418.504.764	57,73

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor Kepala Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit ini dilaksanakan juga oleh Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Seksi dan Surveilans diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 79 % dengan kategori berhasil.

Kendala : di masa pandemi KLB COVID-19, Imnunisasi tidak bisa dilkukan karena pembatasan massa yang secara otomatis mempengaruhi capaian UCI, sasaran bayi baru yang akan diimunisasi dapat berubah sewaktu-waktu karena kondisi pekerjaaan orang tua yang berpindah-pindah/tidak menetap. Terkait COVID-19 setiap hari ada pelaporan yang selalu update diperlukan tenaga yang khusus yang memegang aplikasi terkait

Saran perbaikan : menigkatkan kerjasama lintas sektor, melakukan inovasi kegiatan agar kegiatan imunisasi tetap berjalan, memenuhi tenaga yang masih kurang, sampel COVID-19 untuk pemeriksaannya sebagian masih dikirim keluar tanah laut untuk diperiksa

Rencana aksi : melakukan pemenuhan tenaga bidan desa/perawat desa yang masih kosong sebagai ujung tombak pelaksana imunisasi dan menambah tenaga kader posyandu kordinasi dengan lintas sektor di desa, memberdayakan tenaga yang sudah ada sambil menunggu usulan tenaga,meningkatkan koordinasi dan advokasi terkait penggunaan alat PCR yang ada di Rs Boejasin sehinggal sampal hasilnya dapat terbaca dengan baik dan tidak perlu keluar daerah, meskipun berisiko SDM yang bersanglkutan melakukan tugas ganda dengan tingkat stres yang tinggi.

Hal-hal yang sudah dilaukakan : menyurati puskesmas untuk melakukan sweeping ke Rumah-rumah yang mempunyai bayi dan balita untuk dilakukan imunisasi, mengusulkan

kekurang SDM di desa ke subbag umpeg untuk diteruskan ke BPKPSDM, memberdayakan tenaga yang sudah ada sambil menunggu usulan tenaga, meskipun berisiko SDM yang bersanglkutan melakukan tugas ganda dengan tingkat stres yang tinggi, melakukan koordinasi dengan pihak Rs Boejasin terkait pemeriksaan sampel, melakukan pengiriman sampel lebih awal ke banjarmasin.

Ketersediaan SDM : Pengelola Program Imunisasi 1 (satu) orang, Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi 1 (satu) orang, dan Tenaga PTT 1 (satu) orang, sesuai Berdasrkan Analisis Beban Kerja (ABK) SDM yg masih kurang adalah Pengawas Monitorong dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas 1 (satu) orang dan Pengadministrasian Umum 1 (satu) orang.

- **Contoh Foto-Foto Kegiatan :**

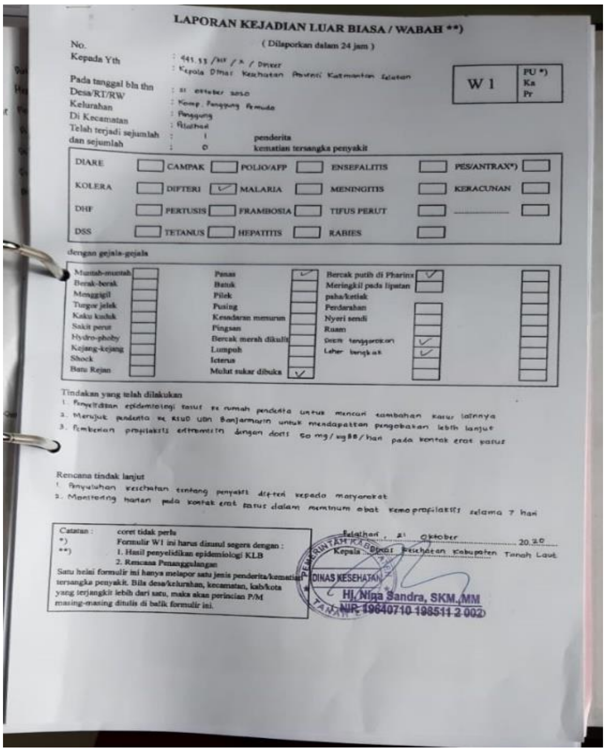

LAPORAN KEJADIAN LUAR BIASA / WABAH **)

(Dilaporkan dalam 24 jam)

W 1 | PU *) Ka Pr

No. : 441.33 / ... / ... / Dinkes
Kepada Yth : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Pada tanggal bln thn : 21 oktober 2020
Desa/RT/RW : Komp. Pangyung Pemuda
Kelurahan : Pangyung
Di Kecamatan : Pelaihari
Telah terjadi sejumlah : 1 penderita
dan sejumlah : 0 kematian tersangka penyakit

DIARE [ ]	CAMPAK [ ]	POLIO/AFP [ ]	ENSEFALITIS [ ]	PES/ANTRAX*) [ ]
KOLERA [ ]	DIFTERI [✓]	MALARIA [ ]	MENINGITIS [ ]	KERACUNAN [ ]
DHF [ ]	PERTUSIS [ ]	FRAMBOSIA [ ]	TIFUS PERUT [ ]	.... [ ]
DSS [ ]	TETANUS [ ]	HEPATITIS [ ]	RABIES [ ]	

dengan gejala-gejala

Muntah-muntah [ ]	Panas [✓]	Bercak putih di Pharinx [✓]
Berak-berak [ ]	Batuk [ ]	Meringkil pada lipatan paha/ketiak [ ]
Menggigil [ ]	Pilek [ ]	Perdarahan [ ]
Turgor jelek [ ]	Pusing [ ]	Nyeri sendi [ ]
Kaku kuduk [ ]	Kesadaran menurun [ ]	Ruam [ ]
Sakit perut [ ]	Pingsan [ ]	Sakit tenggorokan [✓]
Hydro-phoby [ ]	Bercak merah dikulit [ ]	Leher bengkak [✓]
Kejang-kejang [ ]	Lumpuh [ ]	
Shock [ ]	Icterus [ ]	
Batu Rejan [ ]	Mulut sukar dibuka [✓]	

Tindakan yang telah dilakukan
1. Penyelidikan epidemiologi kasus ke rumah penderita untuk mencari tambahan kasus lainnya
2. Merujuk penderita ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut
3. Pemberian profilaksis eritromisin dengan dosis 50 mg/kgBB/hari pada kontak erat kasus

Rencana tindak lanjut
1. Penyuluhan kesehatan tentang penyakit difteri kepada masyarakat
2. Monitoring harian pada kontak erat kasus dalam meminum obat kemoprofilaksis selama 7 hari

Catatan : coret tidak perlu
*) Formulir W1 ini harus disusul segera dengan :
**) 1. Hasil penyelidikan epidemiologi KLB
2. Rencana Penanggulangan
Satu helai formulir ini hanya melapor satu jenis penderita/kematian tersangka penyakit. Bila desa/kelurahan, kecamatan, kab/kota yang terjangkit lebih dari satu, maka akan perincian P/M masing-masing ditulis di balik formulir ini.

Pelaihari , 21 Oktober 2020
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KESEHATAN

Hj. Nina Sandra, SKM.,MM
NIP. 19640710 198511 2 002

\

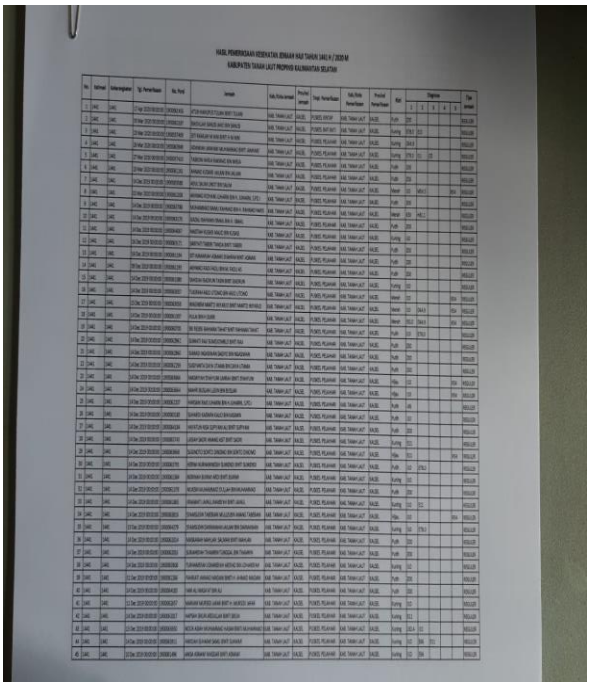

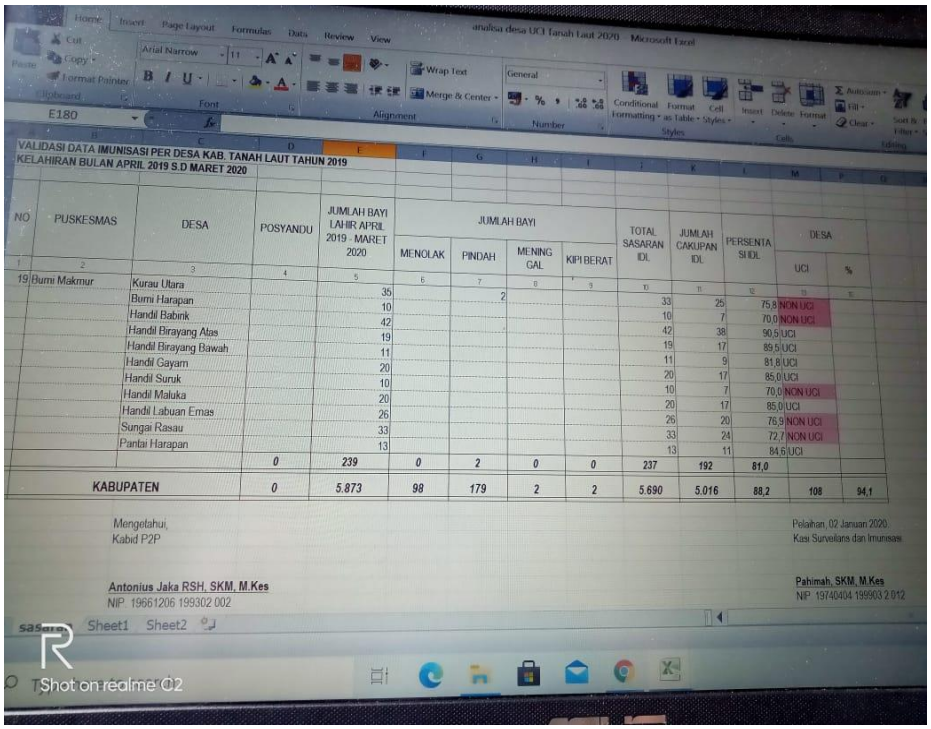

VALIDASI DATA IMUNISASI PER DESA KAB. TANAH LAUT TAHUN 2019
KELAHIRAN BULAN APRIL 2019 S.D MARET 2020

NO	PUSKESMAS	DESA	POSYANDU	JUMLAH BAYI LAHIR APRIL 2019 - MARET 2020	JUMLAH BAYI				TOTAL SASARAN IDL	JUMLAH CAKUPAN IDL	PERSENTA SIDL	DESA	
					MENOLAK	PINDAH	MENINGGAL	KIPI BERAT				UCI	%
19	Bumi Makmur	Kurau Utara		35		2			33	25	75,8	NON UCI	
		Bumi Harapan		10					10	7	70,0	NON UCI	
		Handil Babirik		42					42	38	90,5	UCI	
		Handil Birayang Atas		19					19	17	89,5	UCI	
		Handil Birayang Bawah		11					11	9	81,8	UCI	
		Handil Gayam		20					20	17	85,0	UCI	
		Handil Suruk		10					10	7	70,0	NON UCI	
		Handil Maluka		20					20	17	85,0	UCI	
		Handil Labuan Emas		26					26	20	76,9	NON UCI	
		Sungai Rasau		33					33	24	72,7	NON UCI	
		Pantai Harapan		13					13	11	84,6	UCI	
			0	*239*	*0*	*2*	*0*	*0*	237	192	81,0		
	KABUPATEN		*0*	*5.873*	*98*	*179*	*2*	*2*	5.690	5.016	88,2	108	94,1

Mengetahui,
Kabid P2P

Antonius Jaka RSH, SKM, M.Kes
NIP. 19661206 199302 002

Pelaihari, 02 Januari 2020
Kasi Surveilans dan Imunisasi

Pahimah, SKM, M.Kes
NIP. 19740404 199903 2 012

Sheet1 Sheet2

Shot on realme C2

PENGADAAN CHOLD CHAIN

PENGADAAN KENDARAAN RODA 2

Pengadaan R4, Mobil Oprasional Imunisasi.

DA 8600 LB
12-25
2020.11.11 08:34

2020.11.11 08:33

TOYOTA
DA 8600 LB
12-25
2020.11.04 15:35

PENGADAAN PC ALL IN ONE DAN LAPTOP

PENGADAAN GENSET 20 PCS

PENGADAAN AC DAIKIN

Pertemuan Pengelola Haji Pkm, Tgl. 27 Nov 2020.

Pertemuan Di Aula Barakat Lantai II, Tanggal 27 Mei 2020, PERCEPATAN PENANGGULANGAN COVID 19

Pertemuan Validasi Data Imunisasi 11 November 2020

Pertemuan Tgl. 14 Desember 2020, TENTANG PERSIAPAN PEMBERIAN VAKSIN

UDARA
SEGAR
2020.12.14 10:09

UDARA
SEGAR
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
Kasus 1 (13 Juli 2020)
2020.12.14 11:28

- **Eselon IV (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular) B.8**

Tabel. 3.23
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
	Penimgkatan Pelayanan Penyakit Menular			
1	Jumlah Penderita Penyakit Menular langsung yang dilayanan sesuai standar	8.056	8.056	100
2	Jumlah Penderita Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis yang dilayani sesuai standar	200	200	100
	Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			
1	Jumlah Desa yang Bebas Penyakit Menular	119	119	100
2	Jumlah Foging Fokus yang dilaksanakan sesuai standar	75	75	100
	Pelaksanaan Pembinaan Kader P2P			
1	Jumlah Kader P2P yang terlatih	10	10	100
	Monitoring Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			
1	Jumlah Puskesmas yang aktif melaporkan Kasus Penyakit Menular	19	19	100

No	Kegiatan	Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)	Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian % 6=(5/4)
1	2	3	4	5	6
1	**Monitoring Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**	320.000.000	308.060.000	243.532.750	79

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor Kepala Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini dilaksanakan juga oleh Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 100 % dengan kategori sangat berhasil.

Kendala : perlu penambahan tenaga pengelola program (11 program) untuk memaksimalkan pencapaian target

Saran perbaikan : penambahan tenaga,

Rencana aksi : eliminasi malaria, TBC,prambosia, pengusulan keurangan SDM ke Umpeg untuk diteruskan ke BKPSDM.

Hal-hal yang sudah dilakukan : rapat koordinasi lintas sektor dan penadatanganan komitmen, monitoring evaluasi (MONEV) program, penyiapan peraturan pendukung terkait kegiatan yang akan dilaksanakan,melakukan screening Penemuan Dini penderita HIV, pertemuan DPM/Dokter Praktik Mandiri, screening TBC di ponpes, kegiatan ketuk pintu di desa, investigasi kontak penderita TBC dll

Ketersediaan SDM : Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung 2 (dua) orang yang memegang 11 program (Pengelola program TBC, Diare, Hepatitis, ISPA. Pengelola Program Kusta, Vilariasis, Kusta Prambusia, Rabies. Pengelola HIV, Demam Berdarah Degue) serta Analis Data dan Informasi 1 (satu) orang. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) tenaga yang belum tersedia : pengelola Program Malaria, Lectosperosis, kecacingan dan pengadiminstrasian umum.

Foto-Foto Kegiatan :

- **Eselon IV (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa) B.9**

Tabel. 3.24
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah orang yang mendapat pelayanan Deteksi Dini Faktor resiko Penyakit Tidak Menular sesuai SOP	13.500	18.278	135%
2	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar	36.650	13.847	37,78%
3	Jumlah penderita diabetes yang mendapat pelayanan sesuai standar	23.523	4.431	18,84%
4	Jumlah fasilitas umum yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	21	21	100%
5	Jumlah Puskesmas yang menggunakan pelaporan aktif web posbindu	19	19	100%

Kegiatan	Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)	Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian % 5=(4/3)
1	2	3	4	5
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	273.403.800	136.758.000	60.155.000	44%
Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (Dana KTR)	1.247.570.000	518.980.000	401.258.000	77%

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor Kepala Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini dilaksanakan juga oleh Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit dan Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok, dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 64 % dengan kategori cukup berhasil.

Kendala : perlu penambahan tenaga pengelola program untuk memaksimalkan pencapaian target

Saran perbaikan : penambahan tenaga

Rencana Aksi : Desa Bebas Pasung 2021, IVA test pada WUS di 19 Puskesmas di 2021, Peningkatan Kualitas Pelayanan Posbindu, Peningkatan kawasan tanpa rokok di tahun 2021, pengusulan keurangan SDM ke Umpeg untuk diteruskan ke BKPSDM.

Hal-hal yang sudah dilakukan : screening PTM, Pos Pelayanan Terpadu (Posbindu) PTM, Peningkatan Pengetahuan tentang KTR ke sekolah-sekolah, Pendataan ODGJ

Ketersediaan SDM : Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 2 (dua) orang. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) tenaga yang belum tersedia : Analis Data dan Informasi 1 (satu) orang, Pengelola Penyakit Tidak Menular 1 (satu) orang dan pengadiminstrasian umum 1 (satu) orang.

Foto-Foto Kegiatan :

START

KERUPUK IKAN
ENAK & HALAL

NG MAS PERMAI

- **Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan**

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 6

Sasaran strategis Nomor 6 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.25

Tabel Sasaran Strategis 6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisai Kinerja Sasaran pada tahun ke						
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
				2019			2020			2023
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	21%	37%	100%	37%	0%	0%	68%
			2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	0%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	4,7%	24%	100%	19%	100%	100%	100%
			4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	20%	0%	0%	25%	0%	0%	50%
			5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	41%	41%	100%	44%	52%	118%	56%
			6 . Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	38%	78%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan **67 % dengan cukup berhasil**. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 6 Kepala Bidang Pealayanan Kesehatan ini dilaksanakan oleh Kepala Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020.

- **Eselon IV (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional) B.10**

Tabel. 3.26
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat			
	1. Jumlah Keluarga yang didata dalam pendataan keluarga sehat	94.955	81.102	85,41
	2.Jumlah keluarga yang bermasalah kesehatan mendapat imtervensi pelayanan kesehatan	63.110	63.110	100
	Pelayanan Kesehatan di Lokasi Bencana			
	1. Jumlah Lokasi yang mendapat pelayanan kesehatan tanggap bencana sesuai SOP	7	7	100
	Pelaksanaan pembinaan kesehatan tradisional			
	1. Jumlah kelompok asuhan mandiri taman obat keluarga (ASMAN TOGA) di desa	8	8	100
	Monitorig dan Evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional			
	1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pencatatan dan pelaporan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	0	0	0

Kegiatan	Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)	Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian % 5=(4/3)
1	2	3	4	5
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	224.435.137	2.067.760.193	514.093.544	25 %

Dalam rangka mendukung strategis Nomor 6 dilaksanakan juga oleh Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisonal sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisonal diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 82,1 % dengan kategori berhasil.

Kendala : pandemi COVID-19 tdk dapat maksimal karena pembatasan pengumpulan massa, sedangkan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional lebih banyak berkaitan dengan masyarakat

Saran perbaikan : melakukan inovasi kegiatan agar tetap berjalan di masa pandemi COVID-19.

Rencana Aksi : melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana dan melakukan usulan kekurangan SDM

Hal-hal yang sudah dilakukan: mengusul kekurangan SDM ke Umpeg, PIS-PK sudah mulai masuk kegiatan Intervensi, menyurati UPT Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan yang kemaren tertunda.

Ketersediaan SDM : sangat kurang, hanya terdapat tenaga pengelola pelayanan kesehatan 1 (satu) orang. Berdasrakan Analisis Beban Kerja (ABK) dperlukan tenaga analis analis data dan informasi 1 (satu) orang dan tenaga Pengadministrasi & Penyajian dan Publikasi.

Foto-Foto Kegiatan :

BUNGA MELATI
KELOMPOK
ASUHAN MANDIRI TAMAN
OBAT KELUARGA (ASMAN TOGA)

SELAMAT DATANG
TIM PENILAIAN " LOMBA ASMAN TOGA "
Di Desa Pandansari Kecamatan Kintap
Kabupaten Tanah Laut
Pandansari, 24 September 2020

ASMAN TOGA

- **Eselon IV (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan) B.11**

Tabel. 3. 27
Capaian Kinerja Kepala Seksi Kesehatan Rujukan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama	7	0	0 %
2.	Jumlah kasus kegawat daruratan yang ditangani sesuai SOP	600	522	87%
3.	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan berstatus BLUD	5	14	280 %
4.	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai izin operasional	21	15	71.42%

Kegiatan	Anggaran (Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja/Pagu Murni) (Rp)	Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian % 5=(4/3)
1	2	3	4	5
1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)	1.398.130.000	1.398.130.000	90.535.000	6 %
2. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Krisis Kesehatan dan SPGDT PCS 1 19	513.250.000	315.235.000	257.507.000	82%
3. Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	899.490.000	1.547.510.000	753.237.050	49%

Dalam rangka mendukung strategis Nomor 6 dilaksanakan juga oleh Kepala Seksi Kesehatan Rujukan sesuai kegiatan dalam perjanjian kinerja pada tabel diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 82,2 % dengan kategori berhasil.

Kendala : terdapat refocusing anggaran di 2020 difokuskan untuk kegaiatan penanganan Pandemi COVID-19, kemudian terkait PSC terkendala pada Bangunan/gedung, bangunan yang ada tidak memenuhi standar pelayanan PSC, Sarana dan prasarana pendukung kegiatan PSC masih kurang.

Saran perbaikan : melaksanakan seluruh kegiatan yang diperbolehkan selama pandemi covid-19 contoh pendampingan pasca akreditasi, pendampingan pasca akreditasi dan workshop terkait akreditasi, untuk PSC dukungan anggaran dan lahan untuk pembangunan PSC

Rencana Aksi : Melakasanakan Pendampingan dan woerkshop utk 11 Puskesmas yang akan melaksan, re-akreditasi, Kaji Banding ke Bandung ke PSC 119

Hal-Hal yang sudah dilakukan : Workshop terkaid terkait akreditasi, Mutu dan PPI, Kaji Banding ke sinjai terkait home care home visit

Ketersediaan SDM : Pengelola Dokumen Perizinan 1 (satu) orang, Pengelola Rujukan Kesehatan 1 (satu) orang, Analis Penilaian dan Akreditasi 1 (satu) orang dan tenaga PTT 1 (satu) orang, berdasarkan ABK masih dibutuhkan 1 (satu) orang tenaga pengadministrasian umum 1 (satu) orang, meskipun pada prinsipnya untuk seksi dan PSC mencukupi secara kuantitas, tapi masih perlu peningkatan secara kualitas seperti peningkatan kompetensi melalui diklat-diklat

Foto-Foto Data Dukung dan Kegiatan :

1. Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama = 0
2. Jumlah kasus kegawat daruratan yang ditangani sesuai SOP
3. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan berstatus BLUD = 14
4. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai izin operasional

---

PELAYANAN EMERGENCY

EMERGENCY	JUMLAH
(medis)	
Trauma KLL	233
Trauma non KLL	115
Non Trauma	174
Kematian	
(non medis)	
Kebakaran	2
Banjir / Longsor	2
Gempa Bumi	0
TOTAL	4

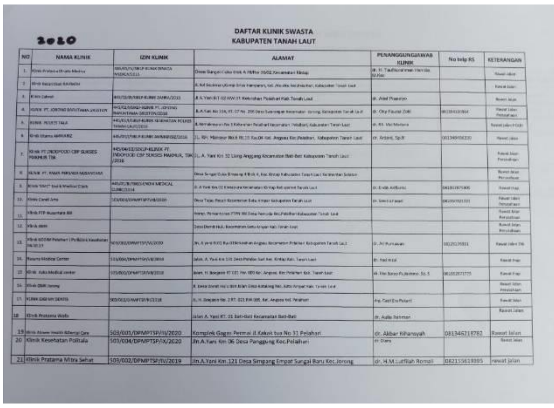

2020

DAFTAR KLINIK SWASTA
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA KLINIK	IZIN KLINIK	ALAMAT	PENANGGUNGJAWAB KLINIK	No telp RS	KETERANGAN
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
2.	[illegible]		[illegible]			[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	dr. [illegible]		[illegible]
4.	KLINIK PT. JORONG BARUTAMA GRESTON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	KLINIK POLRES TALA	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	dr. Ardani, Sp.B	[illegible]	[illegible]
7.	Klinik PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	445/04/III/SIKLP-KLINIK PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR, TBK /2016	JL. A. Yani Km 32 Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut			[illegible]
8.	KLINIK PT. [illegible]		[illegible]			[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.	Klinik PTP Nusantara XIII		[illegible]			[illegible]
12.	[illegible]		[illegible]			[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]		[illegible]			[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
18	Klinik Pratama [illegible]		Jalan A. Yani RT. 01 Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati	dr. [illegible]		Rawat Jalan
19	[illegible]	503/001/DPMPTSP/II/2020	Komplek Gagas Permai Jl.Kakak tua No 31 Pelaihari	dr. Akbar Rihansyah	081346218782	Rawat Jalan
20	Klinik Kesehatan Politala	503/004/DPMPTSP/IX/2020	Jln.A.Yani Km 06 Desa Panggung Kec.Pelaihari	dr. [illegible]		Rawat Jalan
21	Klinik Pratama Mitra Sehat	503/002/DPMPTSP/IV/2019	Jln.A.Yani Km.121 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec.Jorong	dr. H.M.Lutfiah Romali	082155619385	rawat jalan

DAFTAR TOKO OBAT TAHUN 2020

NO	NAMA RUMAH SAKIT	IZIN TOKO OBAT	ALAMAT	NAMA PENANGGUNG JAWAB	NOMOR SIKTTK
1.	Toko Obat Harapan Ibu		Jl. A Yani RT. 07 RW. 3 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	[illegible]	445 / 06.C / SIKTTK / 2015
2.	Toko Obat AZHARI		JL.Veteran RT. 09 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Achmad Sudarsyah	445 / 01 / SIKTTK / 2015
3.	TOKO OBAT SUMBER SEHAT		JL. A. Yani (Depan SDN Angsau 5) Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	[illegible]	445 / 05 / SIKTTK / 2016
4.	Toko Obat AL-GHAZALI		JL. Pasar Lama RT. 05 Rw.01 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	[illegible]	445 / 16.B / SIKTTK / 2015
5.	Toko Obat AL-RAZZAQ		JL.Benawan Raya Rt.20 Rw.07 Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Yudi Rahmadani [illegible]	445 / 03 / SIKTTK / 2016
6.	Toko Obat TAJUL GINA		Jl. A. Yani No.47 Rt 01 Kec.Bati-Bati Kab.Tanah Laut	Nor Aina	445 / 80 / SIKTTK / 2016
7.	Toko Obat BUNDA		Jl. H. M Saibini Rt.15 Rw.6 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	[illegible]	445 / 21.B / SIKTTK / 2016
8.	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA . Tbk	445/01/STRA-UAD/2011/221291	Desa Nusa Indah RT. 003 Rw. 002 Kec. Bati-Bati	[illegible] Kusuma Wardhani, Farm, Apt	
9.	Toko Obat Shopa		Jl. Jendral Sudirman RT.06 Desa Gn Makmur Kec. Takisung	Eka [illegible], A. Md.Far	445/016.a/SIPTTK/2018
10.	Toko Obat ALFARIZY FARMA		Desa Gn. Makmur RT. 08 Kecamatan Takisung		503/020/SIPTTK/DPM-PTSP/X/2018
11.	Toko Obat Hajjah Farma	445 / 01 / SIPEO / 2020	Jln. A Yani km 125 Rt.004 Desa Simpang Empat Sei Baru Kec.Jorong	Indah Mustika Handayani, Amd.Far	503/015/SIPTTK/DPM-PTSP/III/2020
12	Toko Obat Ania	503/001/UU-TB/DPMPTSP/2021	Jl.Komplek Bajuin raya Rt.04 No.06 Desa Atu-atu	Taufik Rahman, Amd.Farm	503/007/UU-SIPTTK/DPM-PTSP/2021

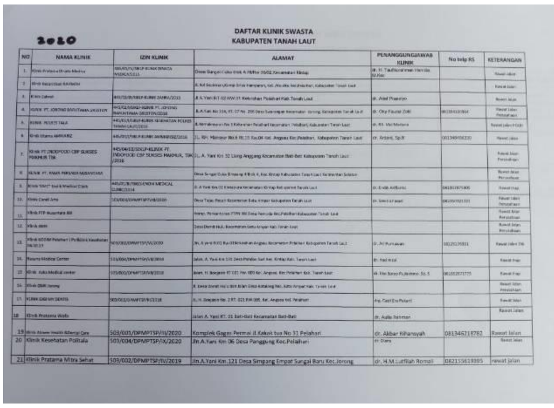

2020

DAFTAR KLINIK SWASTA
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA KLINIK	IZIN KLINIK	ALAMAT	PENANGGUNGJAWAB KLINIK	No telp RS	KETERANGAN
19	[illegible]	503/001/DPMPTSP/II/2020	Komplek Gagas Permai Jl.Kakak tua No 31 Pelaihari	dr. Akbar Rihansyah	081346218782	Rawat Jalan
20	Klinik Kesehatan Politala	503/004/DPMPTSP/IX/2020	Jln.A.Yani Km 06 Desa Panggung Kec.Pelaihari	dr. [illegible]		Rawat Jalan
21	Klinik Pratama Mitra Sehat	503/002/DPMPTSP/IV/2019	Jln.A.Yani Km.121 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec.Jorong	dr. H.M.Lutfiah Romali	082155619385	rawat jalan

DAFTAR TOKO OBAT TAHUN 2020

DATA APOTEK KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020

NO	NAMA SARANA	NO IZIN	ALAMAT	No Telpon	PENANGGUNG JAWAB	JENIS KELAMIN	IJIN PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Apotek Anna Farma	[illegible]	Jl. A. Yani [illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
2	Apotek Zahra	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
3	Apotek [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
4	Apotek [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
5	Apotek [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
6	Apotek Khanza Sehat	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
7	Apotek [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Laki-Laki	[illegible]
8	Apotek Bati-Bati Farma	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
9	Apotek [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
10	Apotek [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
11	Apotek [illegible] Farma	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Laki-Laki	[illegible]
12	Apotek [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
13	Apotek [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
14	Apotek Cantwer Farma	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
15	Apotek [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
16	Apotek Khanza	Dalam proses	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
17	Apotek MC	Dalam proses	[illegible]		[illegible]	Laki-Laki	[illegible]
18	Apotek Khanza Farma Bati-Bati	Dalam proses	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
19	Apotek [illegible]	Dalam proses	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
20	Apotek [illegible]	Dalam proses	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
21	Apotek [illegible]	Dalam proses					
22	Apotek [illegible] Farma	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]
23	Apotek [illegible] Farma	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Perempuan	[illegible]

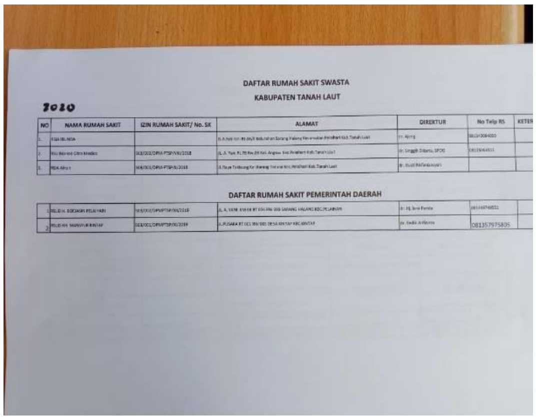

DAFTAR RUMAH SAKIT SWASTA
KABUPATEN TANAH LAUT

2020

NO	NAMA RUMAH SAKIT	IZIN RUMAH SAKIT/ No. SK	ALAMAT	DIREKTUR	No Telp RS	KETER[ANGAN]
1.	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

DAFTAR RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081357975805	

- **Eselon IV (Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) B.12**

Tabel. 3.28
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Jiwa yang menjadi Peserta JKN	334.359	342.626	102%
2.	Jumlah Rumah Sakit yang bekerjasama dalam jaminan Kesehatan Daerah	6	6	100%
3.	Jumlah Puskesmas yang aktif dalam pencatatan dan pelaporan pada aplikasi P-Care	19	19	100%

No	Kegiatan	Anggaran Sesuai perjanjian Kinerja/Pagu Murni (Rp)	Anggaran (Pagu Setelah Refocusing/Rasionalisasi/ Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	58.200.000.000	59.588.917.348	47.588.009.721	80%

Dalam rangka mendukung strategis Nomor 6 dilaksanakan juga oleh Kepala Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sesuai kegiatan dalam perjanjian kinerja pada tabel diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 95,8 % dengan kategori sangat berhasil.

Jumlah kepesertaan : Jumlah Penduduk 351.057 di Tahun 2020, Jumlah Jiwa yang menjadi Peserta JKN target 334.359 jiwa, realisasi 342.626 jiwa (102 %), UHC di Kabupaten Tanah Laut sudah tercapai tercapai meski belum 100 %.

Kendala: Masa transisi dari jamkesda ke jamkesnas permasalahannya adalah tidak semua pembiayaan pelayanan kesehatan di tanggung oleh JKN KIS

Saran Perbaikan : harus ada jamkesda untuk mengcover pembiayaan pelayanan kesehatan yang tidak tercover oleh JKN KIS

Rencana Aksi : membuat TS Jamkesda pendamping JKN KIS, membuat Darfat Perbup untuk Jamkesda, membuat perencanaan anggaran untuk mencover s.d klaim 12 bulan

Ketersediaan SDM : Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1 (satu) orang, Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan 1 (satu) orang dan PTT 1 (satu) orang berdasarkan ABK masih dibutuhkan Tenaga Pengadminitrasian Umum 1 (satu) orang.

Foto-Foto Data Dukung

Dashboard Capaian JKN 2020

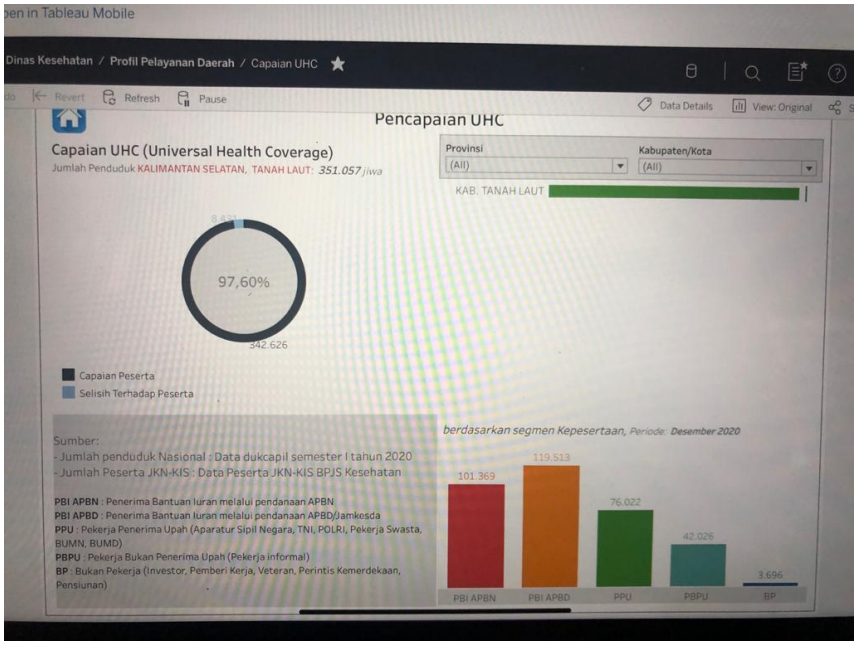

Realisasi Anggaran Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

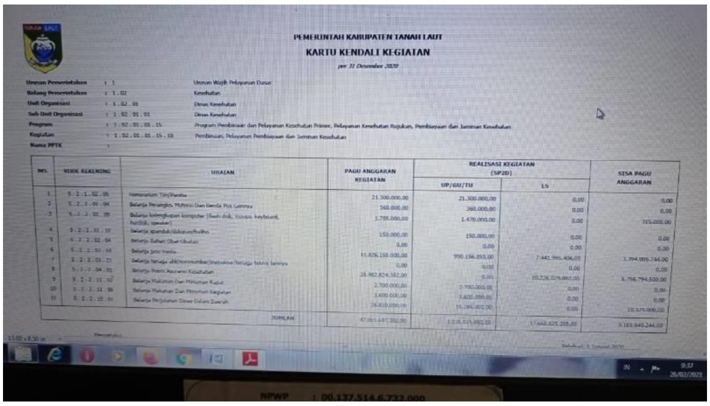

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KARTU KENDALI KEGIATAN

per 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 1.02	Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.01.01	Dinas Kesehatan
Program	: 1.02.01.01.15	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kegiatan	: 1.02.01.01.15.10	Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Nama PPTK	:	

NO.	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN (SP2D)		SISA PAGU ANGGARAN
				UP/GU/TU	LS	
1	5.2.1.02.05	Honorarium Tim/Panitia	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
3	5.2.2.01.09	Belanja kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	1.785.000,00	1.470.000,00	0,00	315.000,00
4	5.2.2.01.10	Belanja spanduk/dokumen/baliho	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5.2.2.03.18	Belanja jasa media	11.826.158.000,00	990.156.850,00	7.441.995.406,00	3.394.005.744,00
7	5.2.2.03.21	Belanja tenaga ahli/narasumber/instruktur/tenaga teknis lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	25.982.824.382,00	0,00	[illegible]	[illegible]
9	5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
10	5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
11	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.810.000,00	15.285.000,00	0,00	10.575.000,00
		JUMLAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

6 Rumah Sakit yang Kerja Sama

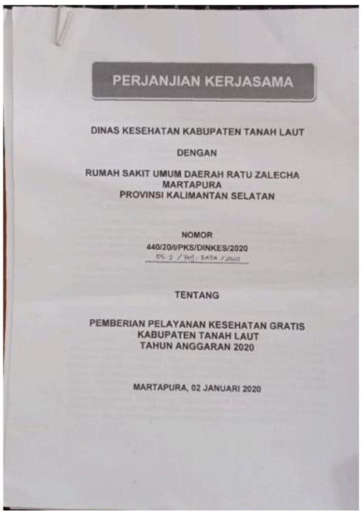

PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR

440/20/I/PKS/DINKES/2020

TENTANG

PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2020

MARTAPURA, 02 JANUARI 2020

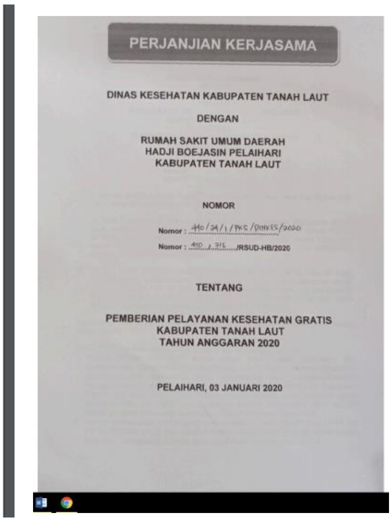

PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR

Nomor : 440/24/I/PKS/DINKES/2020

Nomor : 440 / 315 /RSUD-HB/2020

TENTANG

PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2020

PELAIHARI, 03 JANUARI 2020

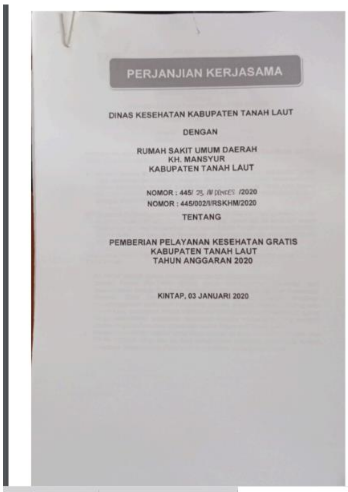

PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 445/ 25 /I/ DINKES /2020

NOMOR : 445/002/I/RSKHM/2020

TENTANG

PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2020

KINTAP, 03 JANUARI 2020

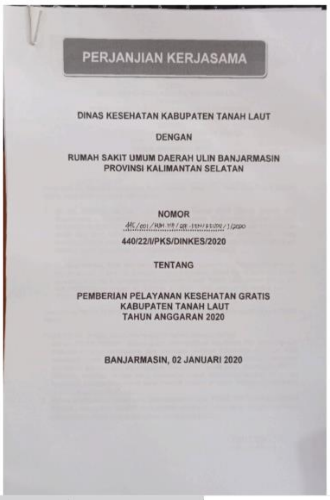

PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR

440/22/I/PKS/DINKES/2020

TENTANG

PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2020

BANJARMASIN, 02 JANUARI 2020

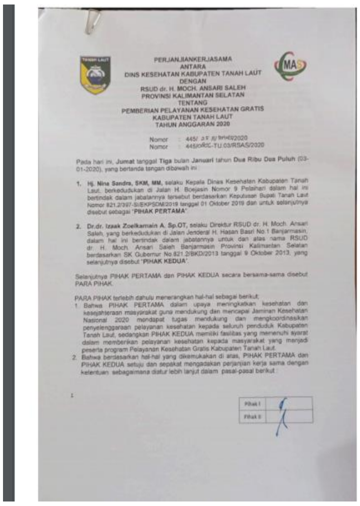

PERJANJIANKERJASAMA
ANTARA
DINS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
RSUD dr. H. MOCH. ANSARI SALEH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 445/ 25 /I/ DINKES/2020
Nomor : 445/0802-TU.03/RSAS/2020

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (03-01-2020), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Hj. Nina Sandra, SKM, MM,** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan H. Boejasin Nomor 9 Pelaihari dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821.2/397-SI/EKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 dan untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Dr.dr. Izaak Zoelkarnain A. Sp.OT,** selaku Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, yang berkedudukan di Jalan Jenderal H. Hasan Basri No.1 Banjarmasin, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK Gubernur No.821.2/BKD/2013 tanggal 9 Oktober 2013, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat guna mendukung dan mencapai Jaminan Kesehatan Nasional 2020 mendapat tugas mendukung dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Kabupaten Tanah Laut, sedangkan PIHAK KEDUA memiliki fasilitas yang memenuhi syarat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi peserta program Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut :

1

Pihak I	
Pihak II	

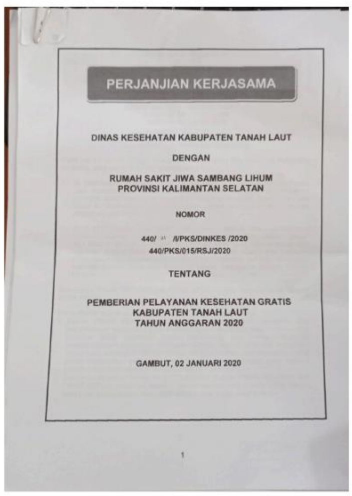

PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR

440/ /I/PKS/DINKES /2020

440/PKS/015/RSJ/2020

TENTANG

PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2020

GAMBUT, 02 JANUARI 2020

1

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020

No	Uraian	Anggaran/Target	Realisasi	%
1	Belanja Langsung	256.477.237.923	195.455.442.323	76
2	Belanja Tidak Langsung	90.398.445.579	76.242.644.588	84,34
3	Pendapatan Daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan	71.387.915.073	76.016.667.657,35	106,48

Dari tabel dapat dilihat Realisasi Anggaran Belanja Langsung (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dari Anggaran Rp. 256.477.237.923,- terealisasi sebesar Rp. 195.455.442.323,- (76%), dan fisik 77 %. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (APBD) tahun 2020 dari Anggaran Rp. 90.398.445.579,- terealisasi sebesar Rp. 76.242.644.588,- (84,34%). Realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp.71.387.915.073,- terealisasi 76.016.667.657,35 (106,48%).

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 pada umumnya sudah tercapai dan sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan, mengingat di tahun 2020 bangsa kita tenga dilanda pandemi covid-19 yang secara tidak langsung sebagian anggaran di Kabupaten Tanah Laut khususnyas di bidang kesehatan harus mengalamai pergeseran, refocusing, rasionalisasi dan perubahan untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19.

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 278.176.449.754,64,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 256.477.237.923,- dengan realisasi pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 195.455.442.323,-.

Rata-rata capaian kinerja sasaran rencana strategis dinas kesehatan : 80,1% (kriteria berhasil)

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya, fasilitas pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan alat kesehatan yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2020 berdasarkan sasaran dan program yang terdiri dari 8 sasaran dan 18 Program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.29

Ringkasan Anggaran Dan Realisasi Berdasarkan Sasaran dan Program Dilaksanakan Pada Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	2020		
		ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat 2. Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat 3. Meningkatnya Kesehatan Lingkungan 4. Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan	7.561.973.600	5,645.493.857	75
	2. Program Bantuan Operasional Kesehatan	17.508.090.000	11.017.583.720	63
	3. Program Jamkesmas	2.103.789.000	1.197.098.029	57
5. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	10.144.893.000	5.752.652.120	57
	5. Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok	518.980.000	401.258.000	77
6. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	6. Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan	63.712.271.641	49.164.628.715	77

	Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan			
	7. Program Informasi Kesehatan Medik	209.956.500	196.352.060	94
	8. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1.254.950.000	501.094.200	40
	9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	10.611.887.000	9.860.126.946	93
	10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	18.898.900	14.176.300	75
	11. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	66.458.817.913	62.406.301.110	94
	12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	17.508.090.000	11.017.583.720	63

7. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	13. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	13.299.730.237	4.923.631.437	37
	14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.477.038.000	1.948.720.731	79
	15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	268.253.000	242.169.000	90
	16. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)	21.605.532.250	14.699.083.788	68
8. Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	17. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	36.293.337.682	26.827.560.704	74
	18. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	185.559.200	113.158.600	61
JUMLAH		256.477.237.923	195.455.442.323	76

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2019

1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
a.	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b.	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
c.	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
d.	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e.	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
f.	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
g.	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
h.	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
i.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
j.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
k.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
a.	Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional
b.	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
c.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
d.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
e.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.	**Program peningkatan disiplin aparatur**
a.	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
b.	Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan
4.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
a.	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
b.	Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
c.	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.	**Program Jamkesmas**
a.	Kegiatan Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya
b.	Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
6.	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**
a.	Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
	a. Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat
	b. Kegiatan Peningkatan dan pengembangan kesehatan kerja dan olah raga
	c. Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
	d. Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
	e. Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
	f. Kegiatan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
	g. Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan remaja dan UKS
	h. Kegiatan Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK)
	i. Kegiatan Pelayanan dan pembiayaan kesehatan masyarakat
	j. Kegiatan Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan usia produktif
	k. Kegiatan Peningkatan kapasitas pelayanan krisis kesehatan dan SPGDT PCS 199
	l. Kegiatan Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (Penurunan Stunting - DAK Penugasan)
	m. Kegiatan Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
	n. Kegiatan Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
8. Program Pengawasan Obat dan Makanan	
	a. Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	a. Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (Dana KTR)
	b. Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (Dana KTR)
	c. Kegiatan Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
	d. Kegiatan Peningkatan kemitraan bagi upaya kesehatan berbasis masyarakat
10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	a. Kegiatan Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
	b. Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin
	c. Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

d. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
a. Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
b. Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
c. Kegiatan Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
d. Kegiatan Peningkatan imunisasi
e. Kegiatan Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a. Kegiatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan
b. Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
c. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d. Kegiatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan (DAK Non Fisik)
e. Kegiatan Pengumpulan data kematian CRVS(Civil registration dan vital statistic)
13. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
a. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, puskemas pembantu dan jaringannya
b. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)
c. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK Penugasan)
14. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
a. Kegiatan Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
b. Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
c. Kegiatan Pengadaan ambulance/mobil jenazah
d. Kegiatan Pengadaan mebeuleur rumah sakit
e. Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
f. Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
g. Kegiatan Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
15. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
a. Kegiatan Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

16. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
a. Kegiatan Peningkatan kapasitas petugas dalam perawatan anak balita
17. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
a. Kegiatan Pelayanan pemeliharaan kesehatan
18. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
a. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
19. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
a. Kegiatan Peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan KB
20. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
a. Kegiatan Screening/ deteksi dini penyakit tidak menular
21. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
a. Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan rujukan
22. Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok
a. Kegiatan Pengembangan kawasan tanpa rokok (Dana KTR)
23. Program Bantuan Operasional Kesehatan
a. Kegiatan Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)
b. Kegiatan Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
24. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
a. Kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang daerah
25. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
a. Kegiatan Penyusunan tabulasi data aset tetap
26. Program Pendidikan Kedinasan
a. Kegiatan Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
27. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
a. Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
28. Program perencanaan pembangunan daerah
a. Kegiatan Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD
29. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
30. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

	a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
31. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
	a. Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan
32. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
	a. Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Note : 32 PROGRAM 86 KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2020

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	a. Penyediaan rapat rapat, konsultasi, dan koordinasi
	b. Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
	c. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	
	a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
	c. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
	d. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	a. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
4. Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	
	a. Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	b. Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
	c. Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
	d. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Krisis Kesehatan dan SPGDT PCS 199
	e. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	
	a. Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD
	b. Penyusunan laporan keuangan
	c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	

	a. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK REGULER)
	b. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (Penurunan Stunting DAK Penugasan)
	c. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Kesehatan
7.	**Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan**
	a. Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
	b. Pembinaan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	c. Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
	d. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
	e. Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (DID)
8.	**Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit**
	a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
	b. Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular
	c. Peningkatan Imunisasi, Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
	d. Peningkatan Imunisasi, Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DID)
9.	**Program Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok**
	a. Pengembangan kawasan tanpa rokok (Dana KTR)
10.	**Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan SDM Kesehatan)**
	a. Pembinaan, Pengembangan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
	c. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	d. Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan
	e. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK Fisik)
11.	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**
	a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
	b. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)

12. Program Bantuan Operasional Kesehatan
a. Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)
b. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
13. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
a. Pembinaan, Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan
b. Distribusi Obat dan e Logistik (DAK Non Fisik)
14. Program Informasi Kesehatan Medik
a. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Rekam Medik
b. Pengadaan Cetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit
15. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata
a. Pemeliharaan rutin/berkala alat alat kesehatan rumah sakit
16. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata
a. Pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit (DAK)
17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
18. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
a. Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan

Note : 18 PROGRAM 46 KEGIATAN

Dari tabel diatas dapat terlihat perubahan jumlah program dan kegiatan dari tahun 2019 s.d 2020 bahkan di 2021 betambah dengan sub kegiatan. Sesuai dengan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 ke Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 (pemutakhiran) , Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel.3.30
Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

	2019	2020	2021
Program	32	18	5
Kegiatan	86	46	21
Sub Kegiatan	-	-	78

Berikut kami tampilkan juga Perbandingan realisasi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 dan 2020 :

Tabel.3.31
Perbandingan realisasi pendapatan dan belanja skpd
Tahun 2019 dan 2020

a. Versi LRA Dinas Kesehatan

No	Uraian	Realisasi tahun 2019 (Rp)	Realisasi tahun 2020 (Rp)	% peningkatan
1.	PENDAPATAN	59.080.113.792,00	78. 323. 415. 803, 35	32,57
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.080.113.792,00	78. 323. 415. 803, 35	32,57
	Hasil retribusi daerah	2.902.266.759,00	1.729.696.150,00	(40,40)
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	56.177.847.033,00	76.593.719.653,35	36,34
2.	BELANJA	230.948.601.860,50	271.698.086.911,00	17,64
	Belanja pegawai	81.595.001.000,00	81.440.314.588,00	(0,18)
	Belanja Pegawai		76.242.644.588,00	
	Belanja Pegawai BLUD		5.197.670.000,00	
	Belanja Langsung		190.257.772.323,00	
	Belanja barang dan Jasa	110.071.040.742,00	150.205.830.475,00	36,46
	Belanja modal	39.282.560.118,00	40.051.941.848,00	1,95
	SURPLUS/(DEFISIT)	-171.868.488.068	-193.374.671.107,65	12,51

b. Versi LRA BPKAD

No	Uraian	Realisasi tahun 2019 (Rp)	Realisasi tahun 2020 (Rp)	% peningkatan
1.	PENDAPATAN	59.080.113.792,00	76.016.667.657,35	28,67
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.080.113.792,00	76.016.667.657,35	28,67
	Hasil retribusi daerah	2.902.266.759,00	1.729.696.150,00	(40,40)
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	56.177.847.033,00	74.286.971.507,35	32,23
2.	BELANJA	230.948.601.860,50	271.698.086.911,00	17,64
	Belanja pegawai	81.595.001.000,00	76.242.644.588,00	(0,18)
	Belanja langsung		195.455.442.323,00	
	Belanja barang dan Jasa	110.071.040.742,00	150.205.830.475,00	36,46
	Belanja Pegawai BLUD		5.197.670.000,00	
	Belanja modal	39.282.560.118,00	40.051.941.848,00	1,95
	SURPLUS/(DEFISIT)	-171.868.488.068	-193.374.671.107,65	12,51

Realisasi pendapatan asli daerah Dinas Kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp. 76.016.667.657,35,- (Tahun 2019 sebesar Rp. 59.080.113.792,00,-) sehingga terjadi peningkatan pendapatan sebesar 28,67 %. (LRA versi BPKAD). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan peserta BPJS dan jumlah pelayanan kesehatan.

4. Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan Penanganan Covid-19

a. Sumber Dana BTT

Tabel 3.32
Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Untuk Kegiatan Penanganan Covid-19 S.D Desember 2020
(Sumber Dana BTT)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Ket
1	DANA BTT TAHAP I	490.000.000	457.054.840	93,28%	32.945.160	
2	DANA BTT TAHAP II	14.921.655.250	7.907.348.442	52,99%	7.014.306.808	
3	DANA BTT TAHAP III	30.581.265.000	16.126.694.628	52,73%	14.454.570.372	

4	DANA BTT TAHAP IV	13.701.123.531	8.633.875.433	63,02%	5.067.248.098	9.120.023.531 (sharing DID)
5	DANA BTT TAHAP V	10.278.509.246	8.168.736.250	79,47%	2.109.772.996	
6	DANA BTT TAHAP VI	6.523.466.500	4.342.286.061	66,56%	2.181.180.439	
7	DANA BTT TAHAP VII	369.500.000	357.136.364	96,65%	12.363.636	
8	DANA BTT TAHAP VIII	28.500.000	19.000.000	66,67%	9.500.000	
	JUMLAH	**76.894.019.527**	**46.012.132.018**	**59,84% (60 %)**	**30.881.887.509**	

Dari tabel dapat dilihat Realisasi Anggaran BTT Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dari Anggaran Rp. 76.894.019.527,- terealisasi sebesar Rp. 46.012.132.018,- (59,84% atau dibulatkan menjadi 60 %) dengan kategori cukup berhasil. Penyerapan tidak dapat maksimal karena juknis penggunaan dana BTT berbeda dengan penggunaan dana APBD murni/kegiatan rutin yang tidak ada batasan waktu penggunaannya. Anggaran BTT di fokuskan untuk memenuhi kebutuhan terkait penanganan covid-19 di Kabupaten Tanah Laut seperti: belanja obat-obatan, alat pelindung diri (APD), belanja alat kesehatan habis pakai, biaya makan dan minum pasien terkonfirmasi covid-19 di rawat maupun di karantina, belanja insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 serta belanja lainnya untuk menunjang kegiatan penanganan covid-19

b. Rekap Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Sumber APBD dan APBN Tahun 2020

No	Sumber Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Ket
1	APBD	95.050.000	94.050.000	99%	
	BLUD	4.204.988.412	1.396.480.942	33%	
	BTT	76.894.019.527	46.012.132.018	60%	
2	APBN	3.648.395.200	2.414.102.150	66%	(DID + BOK, belum termasuk DID dalam BTT)

Dari tabel dapat dilihat rata-rata realisasi Anggaran 65 % dengan kategori cukup berhasil. Pemakaian anggaran tersebar di berbagai program dan kegiatan yang terkait penanganan covid-19 seperti program Peningkatan Imunisasi Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah (DID), program Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (DID), Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (RSUD HB), Kegiatan Pembinaan, Kegiatan Pembinaan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kegiatan Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik) BOK.

Contoh Foto-Foto Kegiatan Penananganan Covid-19 :

C. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dilakukan per triwulan sesuai data terlampir. Selama tahun 2020 pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan setiap triwulan karena terkendala pandemi covid-19. Namun untuk pengumpulan data capaian tetap dilaksankan setiap triwulan.

Dari data Monitoring Capaian kinerja yang dilakukan pertriwulan memang ada beberapa indikator kegiatan yang tidak berjalan dengan

semestinya karena ada beberapa kendala. Hampir semua kegiatan terkendala dengan adanya pandemi covid-19 dan dari segi pendanaan terkendala oleh adanya refocusing atau pemangkasan anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu dari segi Sumber Daya Manusia beberapa bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut memang masih kurang.

Dengan adanya Monitoring dan Evaluasi Kinerja pertriwulan diharapkan semua pihak yang terkait dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat melakukan berbagai langkah demi peningkatan Capaian Kinerja.

Adapun hasil kegiatan yang diperoleh dari Monitoring dan evaluasi capaian Kinerja yaitu;

1. Mendorong semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.
2. Menyampaiakan kendala yang dihadapi
3. Mencari solusi untuk menangani kendala yang dihadapi dalam pencapain Kinerja Dinas Kesehatan.

D. Analisis Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tanah Laut adalah 69,45 meningkat dibanding tahun 2019 di angka 69,31 artinya setiap bayi yang lahir pada tahun 2020 diharapkan mencapai usia 69 tahun 45 hari, meski UHH sangat dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi dimana apabila angka kematian bayi (AKB) menurun maka UHH akan meningkat, sedangkan AKB Tanah Laut meningkat di tahun 2020, akan tetapi masih banyak faktor dapat yang dapat mempengaruhi UHH di bidang kesehatan antara lain:

4. Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada peningkatan pelayanan kesehatan yang bisa diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 diperoleh pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) sebesar 3,5 (range 1-4) atau 83,53 % dimana dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat pada kisaran baik

5. Pelayanan Kesehatan juga bisa diukur dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dimana Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 capaian AKI adalah 123 per 100.000 Kelahiran Hidup lebih rendah dari target RPJMN yaitu 183 per 100.000 kelahiram hidup dan lebih tinggi dari target SDGs yaitu 70 per 100.000 kelahiram hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut mencapai 11 per 1000 Kelahiran Hidup lebih rendah dari target RPJMN yaitu 16 per 1000 Kelahiran Hidup dan SDGs sebesar 12 per 1000 Kelahiran Hidup lebih.
6. Untuk mendekatkan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan serta menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak Dinas Kesehatan telah menempatkan Bidan Desa di semua desa dan kelurahan (130 desa dan 5 Kelurahan) yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, disamping itu juga Dinas Kesehatan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil terutama yang berisiko tinggi dengan mendatangkan dokter spesialis kebidanan secara berkala di Puskesmas yang ditunjuk.
7. Pencegahan terhadap penyakit akan berpengaruh pada angka kesakitan dengan sendirinya juga akan mempengaruhi Umur Harapan Hidup, pelayanan pencegahan terhadap penyakit, Dinas Kesehatan telah melakukan upaya-upaya seperti pelayanan imunisasi dimana di tahun 2020 Unversal Child Imunization (UCI) atau Desa dengan anak yang sudah diberi imunisasi lengkap sebanyak 80%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (tahun 2019 cakupan Desa UCI 90%) hal ini dampak adanya pandemi COVID-19 yang mengahruskan masyarakat *Physical Distancing* dan kebijakan Bupati Tanah Laut untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Dinas Kesehatan juga melaksanakan pelayanan penyuluhan penyakit menular dan tidak menular dimana pencegahan penyakit sangat

diutamakan, di masa Pandemi COVID-19 saat ini fokus utama Dinas Kesehatan adalah pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19.

8. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipengaruhi oleh faktor lokasi, yaitu mudahnya untuk dijangkau atau tidak. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 11 Kecamatan yaitu 2 (dua) Rumah sakit Umum Daerah, 19 (sembilan belas) Puskesmas, 1 (satu) Instalasi Gudang Farmasi, 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Daerah, 61 (enam puluh satu) Puskesmas Pembantu, 124 (seratus dua puluh empat) Poskesdes/Polindes, 19 (sembilan belas) Ambulan, 19 (sembilan belas) Puskesmas Keliling, dan 274 (dua ratus tujuh puluh empat) Posyandu.
9. Bentuk pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada fasilitas pelayanan saja akan tetapi juga meliputi tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terdiri dari Dokter Sub Spesialis 1 (satu) orang, Dokter Spesialis sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, Dokter Umum 82 (delapan puluh dua) orang, Dokter Gigi 25 orang, Perawat 625 orang, Bidan 467 orang, Terapis Gigi dan Mulut 31 orang, Tenaga Gizi 73 orang, Apoteker 25 orang. Fasilitas kesehatan yang merujuk pada kondisi fisik secara kualitas maupun kuantitas juga menjadi hal yang krusial pada terjaminnya kesehatan masyarakat.
10. Tidak hanya mengenai kesehatan yang menunjang angka harapan hidup pada suatu wilayah, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat turut mempunyai pengaruh dan peranan yang besar terhadap derjat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidaknya lingkungan, kesehatan individu, keluarga dan masyarakat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Untuk mengubah

perilaku masyarakat tidaklah mudah namun sangat diperluka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dimana Kabupaten Tanah Laut pencapaiannya di Tahun 2020 adalah 45% (dari 2.485 jumlah pelayanan pada usia pendidikan dasar yang dilakukan survei PHBS terdapat 1.050 rumah tangga yang berPHBS) mencapai target renstra pada tahun 2020 (40%). Angka ini menunjukkan masih ada 55% masyarakat Kabupaten Tanah Laut belum berperilaku hidup bersih dan sehat, mengalami penurunan dari tahun 2019 (60%). Untuk memperkecil terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sebagai akibat dari lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas li ngkungan diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui 5 Pilar STBM yaitu pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dimana masyarakat diajak untuk melihat permasalahan lingkungan dan perilaku yang tidak sehat dan memecahkan sendiri permasalahannya yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan. 5 pilar STBM yaitu, 1). Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), 2). Mencuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air mengalir (CTPS), 3). Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM RT), 4). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, 5). Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga. Tahun 2020 desa yang sudah melaksanakan STBM sebanyak 92 (sembilan puluh dua) desa atau mencapai 170% dari target 2020 sebanyak 54 (lima puluh empat) desa, dan sudah melebihi target renstra di tahun 2020 (53,80%). Akan tetapi untuk pilar pertama yaitu Stop Buang Besar Sembarangan (BABS) sampai tahun 2020 masih 11 % desa yang sudah di nyatakan desa ODF (Open Defecation Free) artinya Desa yang sudah bebas buang air besar sembarangan yang mana dinyatakan melalui deklarasi desa ODF melalui ferivikasi sebelumnya dan target renstra untuk desa ODF di tahun

2020 adalah sebesar 32 %. Meskipun ODF tahun 2020 baru mencapai 11 % hal ini dikarenakan masih banyak desa yang kepala keluarganya tidak memiliki jamban (terkait fisik bangunan jamban keluarga). Namun demikian pelaksanaan kegiatan 5 pilar STBM sudah sebesar 170 %.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan dinas kesehatan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dinas kesehatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran hasil kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2020, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran berkriteria sangat berhasil yaitu Penurunan Angka Kematian Bayi, Penurunan Prevalensi Gizi Stunting dan Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan 2 (dua) sasaran tidak berhasil yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Indeks Keluarga Sehat, secara keseluruhan rata-rata capaian sebesar 63,2% atau bisa dikatakan scara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja Utama Cukup Berhasil, mengalami penurunan dibanding tahun 2019 (rata-rata capaian 75,2 %) hal ini sebagai salah satu dampak adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 8 Sasaran Strategis dan 29 indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, rata-rata telah tercapai seluruhnya 100% dan terdapat 11 indikator sasaran yang realisasinya melebihi target, namun pada tahun 2020 ada 7 indikator yang realisasinya mengalami penurunan dari target sebagai salah satu dampak adanya pandemi Covid-19.

Hasil analisis 8 sasaran yang ada, pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 rata-rata terkategori 84 % dengan kategori berhasil, mengalami penurunan dari tahun 2019 kategori sangat berhasil (88,9%), serta masih terdapat beberapa indikator sasaran dengan kategori sangat berhasil dicapai, cukup berhasil dicapai dan tidak berhasil dicapai.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dari Anggaran Rp. 256.477.237.923,- terealisasi sebesar Rp. 195.455.442.323,- (76%), dan fisik 77 %. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (APBD) tahun 2020 dari Anggaran Rp. 90.398.445.579,- terealisasi sebesar Rp. 76.242.644.588,- (84,34%). Realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp.71.387.915.073,- terealisasi 76.016.667.657,35 (106,48%).

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut dimulai pada bulan Maret awal terjadinya pandemi covid-19 berjalan kurang optimal dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mengahruskan masyarakat *Physical Distancing* dan kebijakan Bupati Tanah Laut untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, fokus kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah di tahun 2020 adalah penanganan pandemi covid-19, karenanya masih banyak hal-hal yang harus dibenahi antara lain yaitu masih tingginya Angka Kematian Bayi AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang masih jauh di bawah standar, menurunnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan serta kegiatan lainnya yang mengalami penurunan atau belum mencapai target. Untuk itu perlu kerja keras dan dukungan seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan untuk lebih bisa berinovasi meningkatkan pelayanan kesehatannya di era pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir, termasuk penggerakan/pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil capaian kinerja yang ada, maka strategi untuk peningkatan capaian kinerja kedepan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama bidang kesehatan.
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal.
3. Peningkatan promosi kesehatan dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan kesehatan, mengaktifkan Desa Siaga terutama menggairahkan kembali Posyandu sebagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang efektif menggerakkan program kesehatan di desa.
4. Diperlukan keberadaan dan aktivitas konkrit pelaku pembangunan kesehatan untuk lebih menggalakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan. Hal ini diperlukan sinergisme, kemitraan serta koordinasi di antara pelaku pembangunan kesehatan di berbagai tingkat administrasi di daerah yang meliputi Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.
5. Diperlukan inovasi anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan di masa pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir untuk memberikan dan meningkatakan standar pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat serta mencapai target indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung keberhasilan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari,

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut

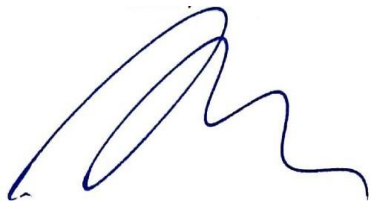

Hj. Nina Sandra, SKM.MM
NIP. 19640710 198511 2 002